



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2016-2021

**JLN. BALAI KOTA UTARA NO. 4 TELP (0451) 425140
PALU - SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap Lembaga/Dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode lima tahun.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kota Palu Tahun 2016-2021 serta Sistem Kesehatan Nasional (SKN), maka pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan kota yang dilakukan oleh semua potensi yang terdiri dari masyarakat, swasta dan pemerintah secara sinergis dan berhasil guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

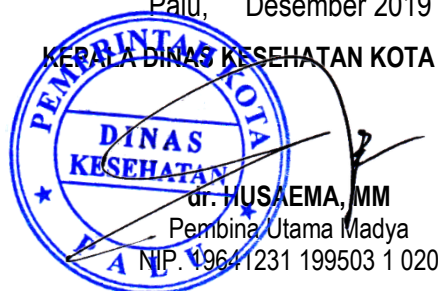
Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 telah dapat disusun dengan baik. Semoga RENSTRA ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Kota Palu dalam kurun waktu tahun 2016-2021 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Palu.

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, RENSTRA Kesehatan Kota Palu 2016-2021 ini telah dievaluasi pada pertengahan (2018) dan akhir periode lima tahun (2021) sesuai kebutuhan yang berlaku. Dokumen RENSTRA ini dapat diubah dan disesuaikan kembali apabila dalam perkembangannya nanti terjadi perubahan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA Perubahan ini diucapkan terima kasih. Tentunya RENSTRA Perubahan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu dan jajarannya, serta masyarakat.

Palu, Desember 2019

KERAJAAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	6
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2	Sumberdaya Dinas Kesehatan	20
2.2.1	SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan	20
2.2.2	Sarana Prasarana Kesehatan	22
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	23
2.3.1	Indikator Makro di Bidang Kesehatan	24
2.3.2	Indikator Pelayanan Urusan Wajib Kesehatan	28
2.3.3	Anggaran Kesehatan	40
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	
2.4.1	Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinkes Propinsi	45
2.4.2	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	46
2.4.3	Analisis terhadap Dokumen KLHS sesuai Pelayanan Dinas Kesehatan	48
2.4.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	48
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah	50
3.2	Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	52

3.3	Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Prop Sulawesi Tengah		
3.3.1	Visi	62
3.3.2	Misi	62
3.3.3	Tujuan dan Sasaran	64
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	69
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	71
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	74
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU	79
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	83
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	91
BAB IV	PENUTUP	96
	Halaman Lampiran	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM di Lingkungan Dinkes Kota Palu berdasarkan Jabatan Tahun 2015	21
Tabel 2.2	SDM di Lingkungan Dinkes Kota Palu berdasarkan Golongan Tahun 2015	21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinkes Kota Palu	22
Tabel 2.4	Daftar Aset Dinas Kesehatan Kota Palu s/d Desember 2015	22
Tabel 2.5	Sarana Kesehatan di Kota Palu Tahun 2014/2015	24
Tabel 2.6	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kota Palu Tahun 2011-2015	27
Tabel 2.7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Puskesmas Tahun 2011-2015	28
Tabel 2.8	Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta JPK Tahun 2011-2015	29
Tabel 2.9	Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Palu Tahun 2011-2015	29
Tabel 2.10	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS di Kota Palu Tahun 2011-2015	30
Tabel 2.11	Rasio Posyandu di Kota Palu Tahun 2011-2015	30
Tabel 2.12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Palu Tahun 2011-2015	32
Tabel 2.13	Persentase Ketersediaan Obat di Kota Palu Tahun 2011-2015	32
Tabel 2.14	Cakupan Kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani <24 jam Tahun 2011-2015	33
Tabel 2.15	Angka Kesakitan akibat penyakit di Kota Palu Tahun 2011-2015	33
Tabel 2.16	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Palu Tahun 2011-2015	36
Tabel 2.17	Perkembangan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2011-2015	37
Tabel 2.18	Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu	40
Tabel 2.19	Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD	41
Tabel 2.20	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kota Palu terhadap Sasaran Renstra Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementerian	45

Tabel 2.21	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kota Palu	47
Tabel 2.22	Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kota Palu	47
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kota Palu	50
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-isu Stratgis	51
Tabel 3.3	Telaahan Visi Kementerian Kesehatan, Dinkes Propinsi Sulteng dan Dinas Kesehatan Kota Palu	62
Tabel 3.4	Keselaran Pokok-pokok Misi Pemerintah Pusat, Dinkes Propinsi Sulawesi Tengah dan Dinkes Kota Palu	64
Tabel 3.5	Keselaran Pokok-pokok Tujuan dan Sasaran Pemerintah Pusat, Dinkes Propinsi Sulawesi Tengah dan Dinkes Kota Palu	66
Tabel 3.6	Permasalahan Dinas Kesehatan Kota Palu berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	67
Tabel 3.7	Permasalahan Dinas Kesehatan Kota Palu berdasarkan Renstra Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	68
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu	75
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palu	81
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu beserta Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016–2021	87
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra SKPD	4
Gambar 1.2	Peranan Renstra dalam Penyusunan RPJMD	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu	20
Gambar 2.2	SDM di Lingkungan Dinkes Kota Palu berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Gambar 2.3	Angka Kematian Bayi/Balita per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2015	25
Gambar 2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2015	25
Gambar 2.5	Perbandingan Rumah Sehat dan Rumah Tidak Sehat Kota Palu Tahun 2013 s/d 2015	31
Gambar 2.6	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kota Palu Tahun 2013 s/d 2015	31
Gambar 2.7	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kota Palu Tahun 2011 s/d 2015	34
Gambar 2.8	Cakupan Imunisasi dirinci per Jenis Antigen di Kota Palu Tahun 2015	35
Gambar 2.9	Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kota Palu Tahun 2011 s/d 2015	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program & sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 tahapan ke-3 (2015-2019), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terus membaik dan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, pembangunan kesehatan pada periode Tahun 2015-2019 menitikberatkan pada Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya

pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu 1) paradigma sehat, dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan serta penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan, dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; dan 3) jaminan kesehatan nasional, dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMN dan RPJPD 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RENJA Pemerintah Daerah.

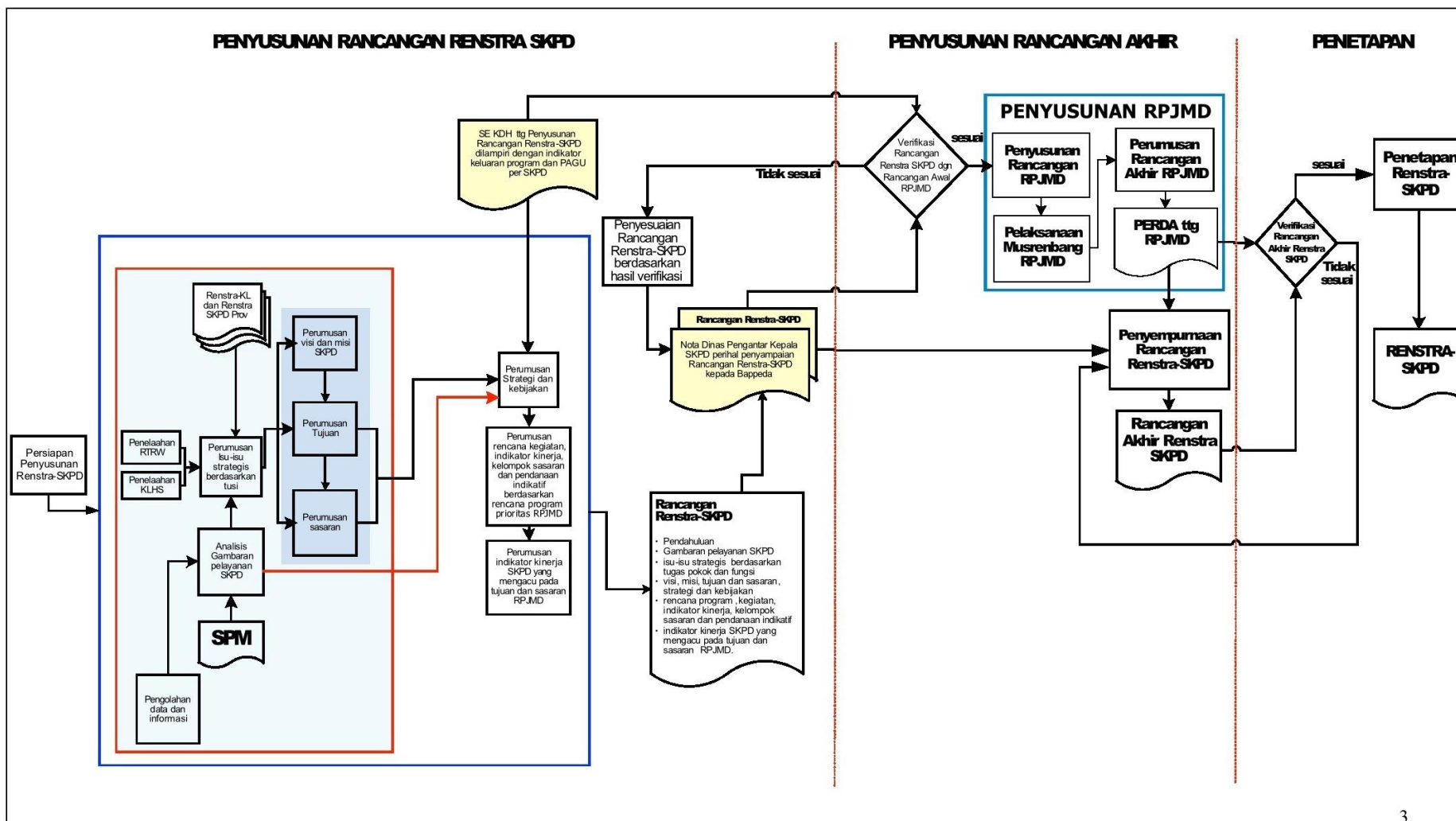
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI) yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021 dan juga mengacu pada RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif ;
- c. Urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata Kota Palu dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Palu.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada gambar berikut :

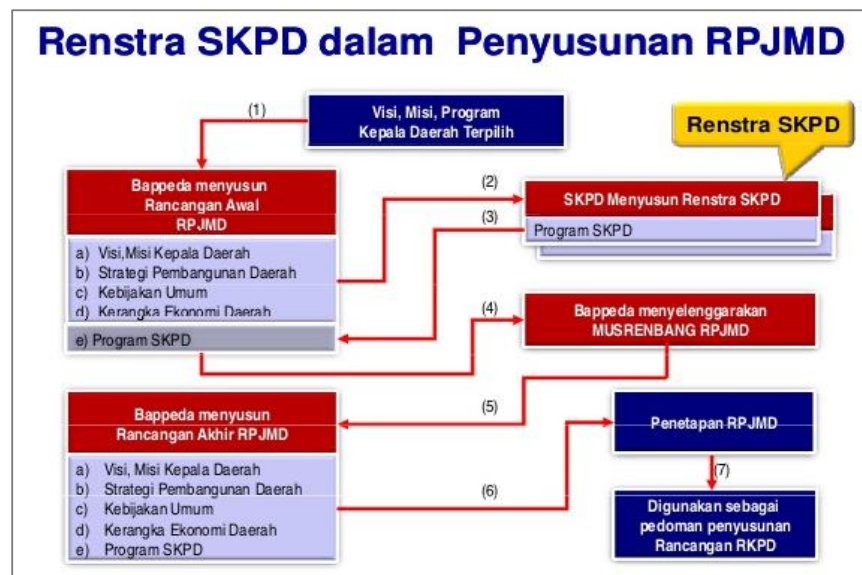
Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi.

Gambar 1.2 Peranan Renstra dalam Penyusunan RPJMD



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Palu Tahun 2016–2021, Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); (4) Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi Walikota Palu "Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat dilandasi Iman dan Taqwa". Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu juga merupakan sinergisme RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah 2016-2021.

RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD akan digunakan sebagai

pedoman penyusunan RAPBD Kota Palu. Nantinya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan akan berpedoman pada Renstra Dinas dan mengacu pada RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun landasan hukum penyusunan Renstra adalah:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Palu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
22. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Kota Palu No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kota Palu No 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Walikota Palu No.9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan ini adalah 1) menjabarkan RPJMD Kota ke dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan; 2) menyelaraskan rencana Strategis Kota dengan Pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan Evaluasi Kinerja lima tahun lalu, menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah; serta 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 dapat diklasifikasi dalam 4 (empat) komponen yaitu:

1. Secara substansial, sebagai arah kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renca Kerja Tahunan perangkat daerah;

3. Secara operasional, menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan urusan Tenaga Kerja;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kesehatan yang dimiliki dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu beserta tantangan dan peluang yang dihadapi.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu, telaahan visi, misi dan program, telaahan renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta penentuan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Palu.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Palu, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Palu.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi Pemerintah Kota Palu terkait kesehatan, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Palu, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Palu.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palu selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu.

BAB VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu.

BAB II

GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dinas Daerah Kota merupakan unsur Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Palu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II B untuk Dinas Kesehatan Kota atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam menjalankan roda organisasi Dinas daerah mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota

Tugas :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Fungsi :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- c) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2) Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Sub bagian Dinas Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c) Pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- d) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(1) Sub bagian Perencanaan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(2) Sub bagian Keuangan dan Aset

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(3) Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

3) Tugas dan Fungsi Bidang dan Seksi Dinas Kesehatan

a) Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(a) Seksi Kesehatan Keluarga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga.

(b) Seksi Gizi

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang gizi.

(c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

b) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Fungsi :

- (1) Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dan kesehatan Jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

(a) Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans

dan Imunisasi

- (b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.

- (c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

- c) Bidang Pelayanan Kesehatan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

Fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

(4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

(a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Layanan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan.

(b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan.

(c) Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

d) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Fungsi :

(1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakaan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana Dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- (2) Penyiapan pelaksanaan Kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(a) Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kefarmasian Makanan dan Minuman.

(b) Seksi Sarana dan Alat Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Alat Kesehatan.

(c) Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

e) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu memiliki tugas: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki fungsi

:

- a. Pelaksanaan penyusunan program
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Perawatan kesehatan masyarakat
- d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
- e. Penyuluhan kesehatan masyarakat
- f. Pelaksanaan pengelolaan retribusi kesehatan masyarakat
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu terdiri 13 UPTD yaitu :

- 1) Puskesmas Pantoloan
- 2) Puskesmas Tawaeli
- 3) Puskesmas Mamboro
- 4) Puskesmas Talise
- 5) Puskesmas Singgani
- 6) Puskesmas Birobuli
- 7) Puskesmas Kawatuna
- 8) Puskesmas Mabelopura
- 9) Puskesmas Bulili
- 10) Puskesmas Kamonji
- 11) Puskesmas Sangurara
- 12) Puskesmas Tipo
- 13) Puskesmas Nosarara

f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi

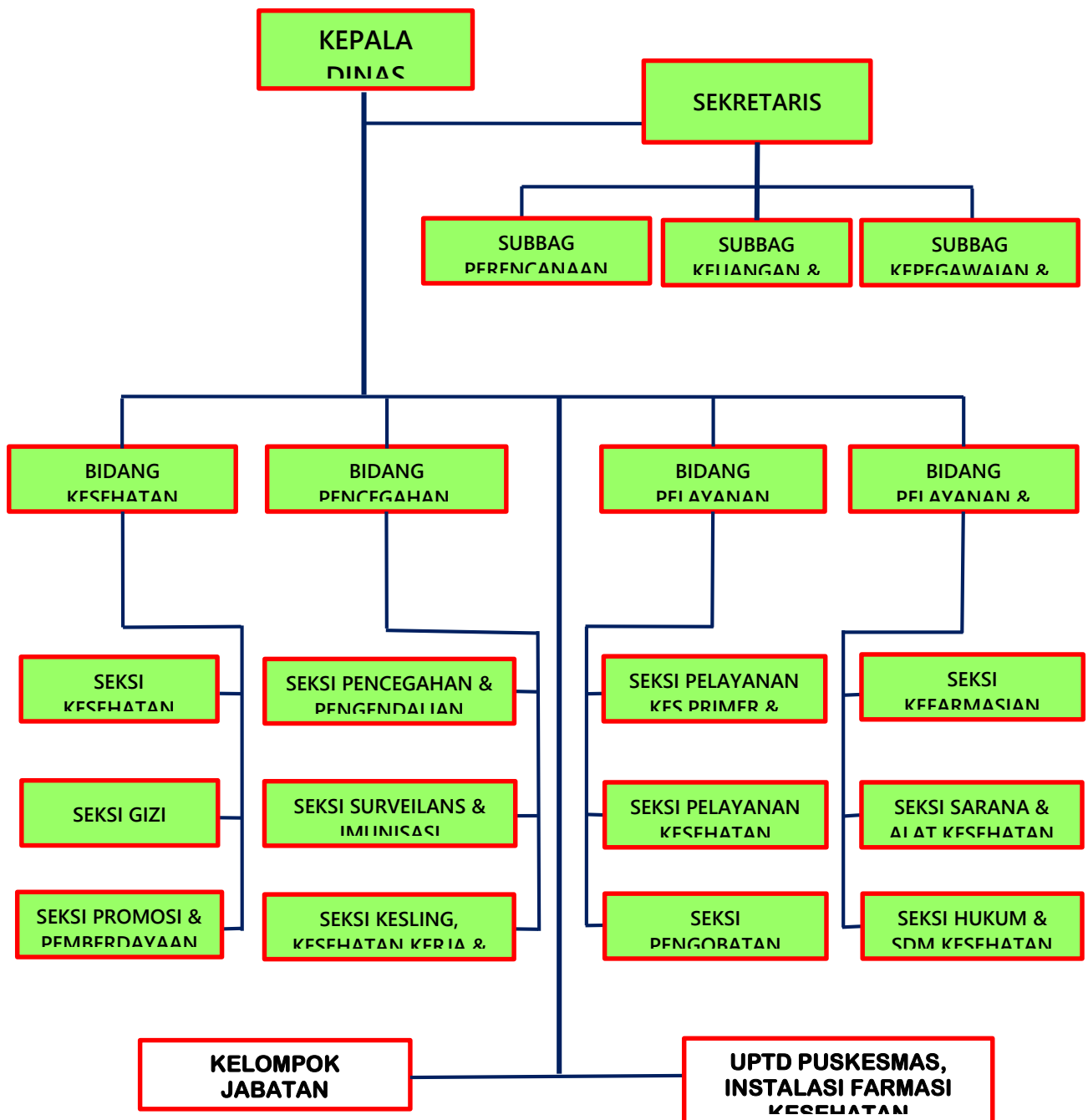
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Palu, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD;

- e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

Gambar 2.1



2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

2.2.1 SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan

Selama Tahun 2015 Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu (tersebar di Dinas Kesehatan,

12 UPTD Puskesmas, dan 1 UPTD Gudang Farmasi) adalah sebanyak 616 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
SDM di lingkungan Dinkes Kota berdasarkan Jabatan Tahun 2015

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural eselon II	1
2	Struktural eselon III	5
3	Struktural eselon IV	41
4	Staf	561
	Jumlah	616

Sumber : Sub bag Kepegawaian & Umum, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah eselon (II, III, IV) sebanyak 47 orang (7,62%) dan jumlah staf sebanyak 569 orang (92,38%).

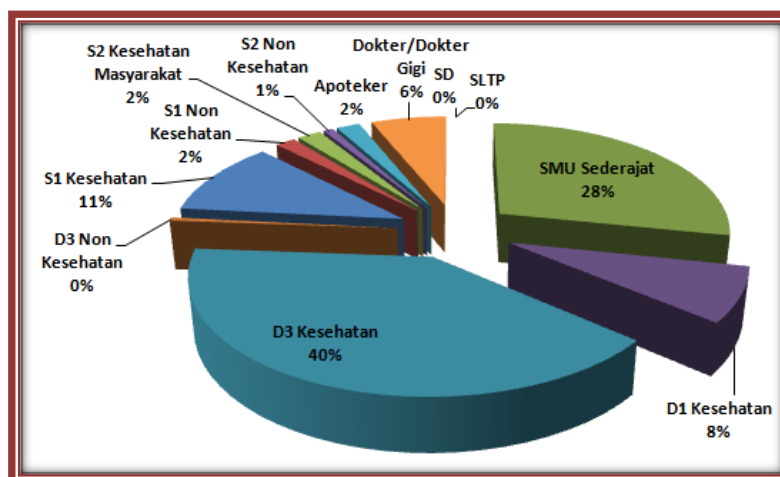
Tabel 2.2
SDM di lingkungan Dinkes Kota berdasarkan Golongan Tahun 2015

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	351
3	Golongan II	250
4	Golongan I	0
	Jumlah	616

Sumber : Sub bag Kepegawaian & Umum, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai di lingkungan dinas kesehatan paling banyak berada di ruang/golongan III (56,98%) dan golongan II (40,58%).

Gambar 2.2
SDM di lingkungan Dinkes Kota Palu berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sub bag Kepegawaian & Umum, 2015

Dari gambar terlihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu berada di jenjang D3 (40%) dan SMU sederajat (28%).

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu

No.	Unit/UPTD	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1	Dinkes Kota Palu	23	59	82	
2	UPTD:				
	1. Puskesmas Tawaeli	6	30	36	
	2. Puskesmas Pantoloan	7	34	41	
	3. Puskesmas Mamboro	7	31	38	
	4. Puskesmas Talise	7	51	58	
	5. Puskesmas Singgani	5	46	51	
	6. Puskesmas Kawatuna	7	39	46	
	7. Puskesmas Birobuli	6	38	44	
	8. Puskesmas Mabelopura	6	41	47	
	9. Puskesmas Bulili	2	41	43	
	10. Puskesmas Kamonji	7	53	60	
	11. Puskesmas Sangurara	8	28	36	
	12. Puskesmas Tipo	5	21	26	
	13. Gudang Farmasi	3	5	8	
	Jumlah	99	517	616	

Sumber: Sub bag Kepegawaian & Umum, 2015

Terlihat dari tabel di atas bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu berada di paling banyak berjenis kelamin wanita (83,93%) dibandingkan laki-laki yang hanya 16,07%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sumber Sarana dan prasarana kesehatan yang terdaftar dalam asset tetap Dinas Dinas Kesehatan Kota Palu sampai dengan Desember 2015 tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Aset Dinas Kesehatan Kota Palu s/d Desember 2015

No.	Uraian Nama Aset	Nilai Rupiah (Rp)
1.	Tanah	2.025.601.040
2.	Peralatan dan Mesin	33.312.388.261
3.	Gedung dan Bangunan	43.539.170.183
4.	Jaringan dan Instalasi	530.962.297
5.	Aset Tetap Lainnya	218.303.000
	Jumlah	79.626.424.782

Sumber: Sub bag Keuangan & Aset, 2015

Adapun data sarana kesehatan yang ada di Kota Palu Tahun 2014 s/d 2015 dilihat dari jenis dan jumlah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sarana Kesehatan di Kota Palu Tahun 2014/2015

No.	Jenis Sarana	Tahun	
		2014	2015
1.	Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)	2	2
2.	Puskesmas Non-Poned	10	10
3.	Puskesmas Pembantu	30	30
4.	Puskesmas Keliling	14	14
5.	Posyandu	222	222
6.	Rumah Sakit Umum Daerah	2	3
7.	Rumah Sakit Polri/TNI AD	2	2
8.	Rumah Sakit Umum Swasta	3	3
9.	Rumah Sakit Bersalin / Ibu Anak	4	4
10.	Klinik	17	33
11.	Laboratorium Kesehatan	4	4
12.	Apotik	164	186
13.	Toko Obat	27	28
15.	Praktek Dokter Umum perorangan	157	157
16.	Praktek Dokter Spesialis	95	95
17.	Praktek Dokter Gigi / Gigi Spesialis	49 / 1	49 / 1
18.	Praktek Bidan Swasta	65	65
19.	Pengobatan Tradisional	10	10

Sumber: Seksi Regulasi & Kefarmasian, 2014 & 2015

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan keberhasilan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Palu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah diatur pada Peraturan Walikota Palu Nomor 22 Tahun 2008, dan dibandingkan dengan target SPM (diatur dalam PERMENKES Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan), target IKU (diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah) dan juga dengan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang

diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta target indikator kesehatan lainnya.

2.3.1 Indikator Makro Bidang Kesehatan

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan indikator makro bidang kesehatan, yaitu:

a. Angka Kematian Bayi/Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

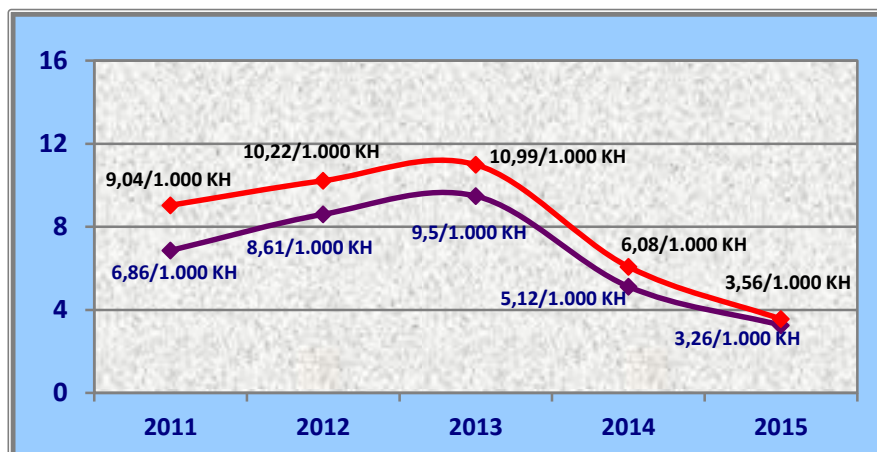
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, air bersih, dan infeksi penyakit di masyarakat.

AKB di Kota Palu mengalami penurunan sejak 3 tahun terakhir, dimana AKB pada Tahun 2015 sebesar 3,26 per-1.000 KH dengan 22 kasus kematian, menurun jika dibandingkan dengan AKB Tahun 2014 yaitu 5,12 per-1.000 KH (37 kasus) dan AKB Tahun 2013 yaitu 9,84 per-1.000 KH (69 kasus). Adapun AKABA pada Tahun 2015 yaitu 3,56 per-1.000 KH (24 kasus kematian), menurun drastis dari Tahun 2014 yaitu 6,08 per-1.000 KH (44 kasus) dan dari Tahun 2013 sebesar 10,99 per-1.000 KH (80 kasus).

Penyebab kematian terbanyak pada bayi adalah BBLR, aspirasi, asfiksia dan penyebab lain-lain seperti infeksi, hydrocephalus, gangguan kelainan hati, icterus, aspirasi, sepsis, kelainan jantung, kelainan kandung kemih, demam kejang, infeksi saluran pencernaan, kelainan usus, dan infeksi paru. Ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat menentukan kondisi bayi yang akan dilahirkan. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Hal ini sangat berkaitan erat

dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.

Gambar 2.3
Angka Kematian Bayi/Balita per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2015

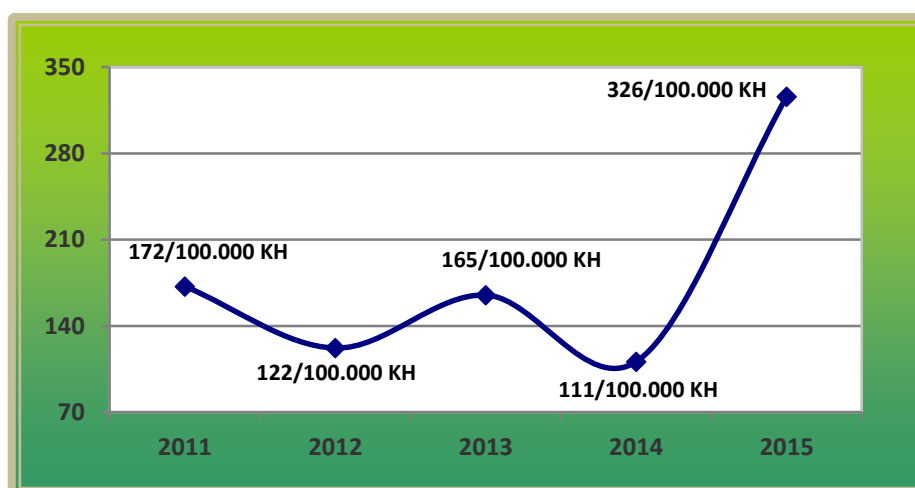


Sumber : Seksi KIA, 2015

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dari derajat kesehatan. Selama tiga tahun terakhir AKI di Kota Palu cenderung berfluktuasi, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 164,79 per-100.000 KH pada Tahun 2013 (12 kasus kematian) menjadi 326,46 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2015 dengan 22 kasus kematian.

Gambar 2.4
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2015



Sumber : Seksi KIA, 2015

Adapun penyebab kematian ibu terbanyak dapat dirinci pada ibu hamil akibat penyebab lain-lain sebanyak 6 kasus (1 Abortus provocatus, 1 sesak, 1 suspek TB paru, 1 encelophati, 1 KPD +

Febris, 1 KET), pada ibu melahirkan akibat perdarahan (4 kasus), eklampsia (1 kasus), dan penyebab lain-lain sebanyak 6 kasus (2 emboli, 1 DC/Decompensasi Cordis, 1 TB Paru + Meningitis, 1 bronchitis+sesak, 1 fatal refluks + emboli), dan pada ibu nifas akibat perdarahan (1 kasus), infeksi (1 kasus), eklampsia (1 kasus) dan penyebab lain-lain sebanyak 2 kasus (1 baby blues + malnutrisi, dan 1 penyakit jantung bawaan).

Dari fakta yang ada di lapangan, faktor penyebab langsung kematian ibu masih didominasi oleh eklampsia dan penyebab lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu adalah faktor 3 (tiga) Terlambat yaitu terlambat mencapai fasilitas pelayanan, terlambat mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, dan 4 (empat) Terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Keduanya saling berkaitan dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif merata penyebarannya, namun kompetensinya masih belum memadai. Demikian juga keberadaan Puskesmas PONED dan RS PONEK harus di iringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja juga menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Meningkatnya peserta KB juga merupakan potensi dalam menurunkan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi potensi untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Dalam upaya akselerasi penurunan AKI dan AKB di Kota Palu telah diadakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat

memberikan daya ungkit terhadap percepatan penurunan AKI dan AKB antara lain peningkatan cakupan dan kualitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kegiatan P4K (Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), pertemuan AMP (Audit Maternal Perinatal) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun guna membahas faktor penyebab kematian bayi dan ibu serta upaya penanganannya, pelacakan kasus Bumil Resti, pertemuan evaluasi dan tindak lanjut PWS-KIA, Pelatihan Orientasi Pemasaran Sosial bagi bidan kelurahan.

c. Balita dengan Status Gizi Buruk

Permasalahan kasus gizi buruk sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu dengan tingkat pendidikan yang rendah, terutama kurangnya pengetahuan ibu tentang pola asuh dan pemberian makanan, sehingga tidak dapat mempertahankan status gizi balita pasca penanganan, keadaan ini menyebabkan munculnya secara berulang kasus gizi buruk. Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan bahwa seluruh kasus gizi buruk harus mendapat penanganan 100% baik secara rawat inap maupun rawat jalan atau perawatan di rumah.

Tabel 2.6
Prevalensi Balita Gizi Buruk & Gizi Kurang di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
a. Prevalensi Gizi Buruk	0,19	0,22	0,21	0,17	0,16
b. Prevalensi Gizi Kurang	2,81	2,62	2,86	1,98	2,49

Sumber : Seksi Gizi, 2015

Cakupan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Kota Palu selama 5 tahun terakhir telah memenuhi target Renstra 2010-2015 dengan capaian gizi buruk $\leq 1\%$ dan gizi kurang $\leq 5\%$. Upaya-upaya penanggulangan kasus gizi buruk di wilayah Kota Palu yang telah dilakukan antara lain dengan mengaktifkan pelacakan dan validasi kasus dari Puskesmas ke Rumah Sakit, memberdayakan keluarga kasus gizi buruk melalui pendampingan pasca kasus dan monitoring secara kontinu/berkelanjutan agar kasus gizi buruk pada balita yang sama tidak terjadi.

2.3.2 Indikator Pelayanan Urusan Wajib Kesehatan

Urusan Wajib Kesehatan di implementasikan melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program-program tersebut diukur melalui indikator kesehatan yang digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan diuraikan sebagai berikut :

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencapaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah masyarakat miskin yang sakit dan berkunjung yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan dasar milik Pemerintah dalam hal ini Puskesmas di seluruh KotaPalu.

Tabel 2.7
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Puskesmas

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase cakupan pelayanan kesehatan maskin	111,21	101,08	121,09	140,90	98,01

Sumber: Seksi Jaminan Kesehatan, 2015

2) Persentase Penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase Penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah jumlah penduduk Kota Palu yang terdaftar menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (dalam hal ini BPJS, Jamkesda, Jamsostek, dan Asuransi kesehatan lainnya).

Tabel 2.8
Persentase Penduduk yang menjadi Peserta JPK
Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Cakupan	53,09	54,36	50,13	60,00	75,06

Sumber : Seksi Jaminan Kesehatan, 2015

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Palu dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif maupun kuratif. Adapun kegiatan indikator Program Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain adalah:

- (1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya;
- (2) Pemeliharaan dan Pemulihan;
- (3) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan;
- (4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus RS;
- (5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Siswa;
- (6) Dukungan Operasional Puskemas.

b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1) Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat). Desa siaga aktif memiliki 4 strata yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri.

Tabel 2.9
Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bidang Promkes, 2015

2) Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Cakupan rumah tangga ber-PHBS yaitu rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator, yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dirumah sekali seminggu, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok didalam rumah.

Tabel 2.10
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase PHBS	45,74	37,58	36,80	36,48	36,05

Sumber: Bidang Promkes, 2015

3) Rasio Kecukupan Posyandu

Untuk mengetahui tingkat kecukupan Posyandu terhadap masyarakat yang ada kita dapat menghitung rasio Posyandu terhadap terhadap jumlah bayi dan balita yang ada di wilayah kerja Posyandu tersebut.

Tabel 2.11
Rasio Posyandu di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Posyandu per satuan Balita	8,88	5,73	7,36	4,68	6,43

Sumber: Seksi Promkes, 2015

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Palu dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif maupun kuratif. Adapun kegiatan indikator Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain adalah:

- (1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
- (2) Sosialisasi desa siaga;
- (3) Pemetaan PHBS;

- (4) Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada;
- (5) Pembinaan Posyandu.

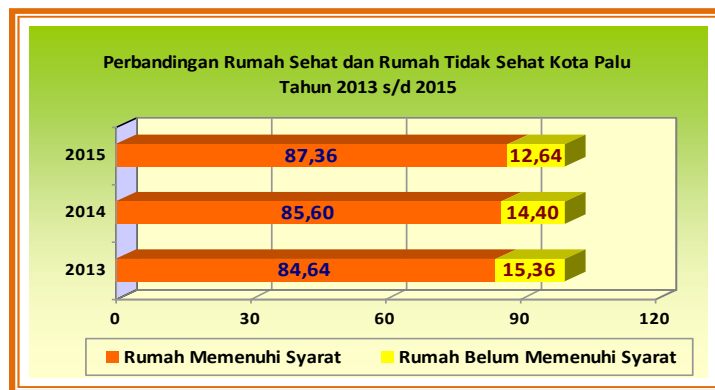
c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pencapaian Program Pengembangan Lingkungan Sehat diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1) Persentase Rumah Sehat

Cakupan rumah sehat adalah rumah yang memenuhi kriteria minimal: akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan yang dihitung kumulatif dari tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan keseluruhan rumah yang ada.

Gambar 2.5

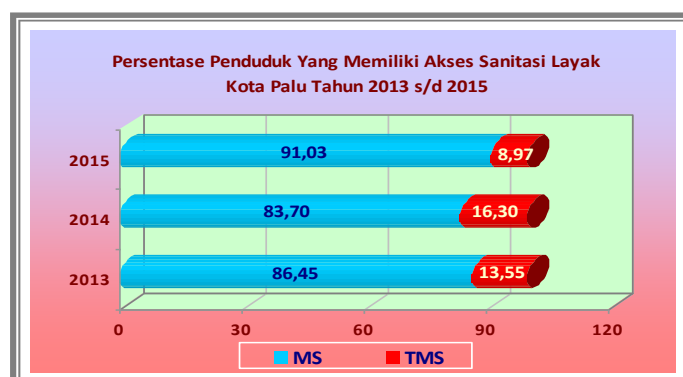


Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan, 2015

2) Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak

Penduduk dikatakan mendapat akses sanitasi layak jika fasilitas sanitasi yang digunakan (jamban) memenuhi syarat kesehatan antarlain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama.

Gambar 2.6



Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan, 2015

3) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak

Rumah tangga dikatakan menggunakan atau mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari ledeng, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak $\geq 10\text{m}$ dari tempat pembuangan limbah/kotoran, dan penampungan air hujan.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase penduduk berakses air minum	78,43	78,43	70,93	88,80	88,11

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan, 2015

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan lingkungan sehat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif maupun kuratif. Adapun kegiatan indikator Program Pengembangan Lingkungan Sehat antara lain adalah:

- (1) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat;
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Penyehatan air.

d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pencapaian Program Obat dan Perbekalan Kesehatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu:

1) Persentase Ketersediaan Obat Generik dan Obat Essensial

Cakupan ketersediaan obat generik dan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Palu sudah memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2015 yaitu $\geq 80\%$

Tabel 2.13
Persentase Ketersediaan Obat di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pengadaan obat generik	84,62	82,46	84,47	86,36	88,89
Pengadaan obat esensial	86,54	61,40	73,79	72,73	83,84

Sumber: Seksi Kefarmasian, 2015

e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencapaian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1) Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

Kelurahan mengalami KLB adalah Jumlah KLB di desa/kelurahan dimana terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan.

Tabel 2.14
Cakupan Kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24jam
Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kelurahan KLB yang ditangani < 24 jam	12	13	0	1	1
% Cakupan kelurahan KLB yang ditangani <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Seksi Sepimkesma, 2015

2) Menurunkan Angka Kesakitan akibat Penyakit

Angka kesakitan akibat penyakit, dapat berupa angka insiden maupun angka prevalensi dari suatu penyakit dan merupakan penggambaran kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Angka kesakitan juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan.

Tabel 2.15
Angka Kesakitan akibat penyakit di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Incident Rate DBD per-100.000 pddk	304,2	288,9	223,8	150,5	181,6
Case Fatality Rate DBD (%)	0,85	0,57	0,70	0,17	0,31
Prevalensi HIV	0,003	0,013	0,025	0,021	0,023
API Malaria per-1.000 penduduk	0,060	0,096	0,008	0,016	0,014
Case Detection Rate TB (%)	47,95	48,56	49,38	53,21	58,01
Case Notification Rate (CNR) :					
- Kasus baru TB per-100.000 penduduk	100,34	101,96	103,71	111,84	121,80
- Seluruh Kasus TB per-100.000 penduduk	131,30	148,96	176,31	176,71	240,83
- Seluruh Kasus TB per-100.000 penduduk	79,92	80,57	78,44	78,54	84,29
Cure Rate TB (%)	0,9	2,2	4,4	0	3,3
Cure Rate TB (%)	1,9	1,4	1,0	2,1	2,1
Case Fatality Rate TB per-100.000 penduduk	12,3	14,0	10,4	11,9	10,8
penduduk	18,1	19,0	18,3	19,7	19,3

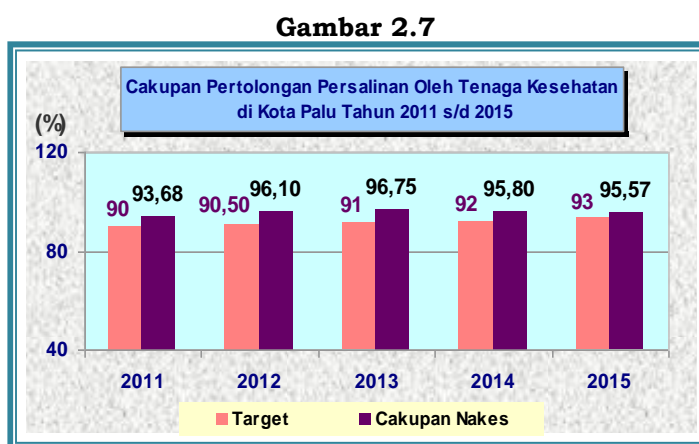
Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit, 2015

f. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pencapaian keberhasilan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja, yaitu:

1) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.



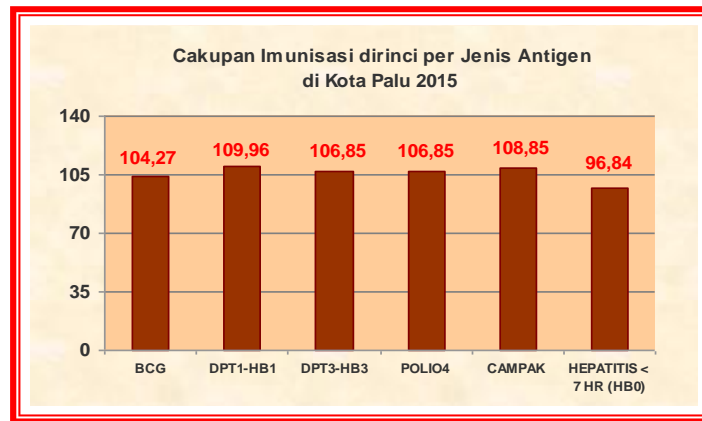
Sumber: Seksi KIA, 2015

2) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi 0-11 Bulan

Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan sesuai dengan umurnya, karena diharapkan pada kondisi ini sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Namun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan drop out (DO) imunisasi.

Cakupan imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan di kota Palu berdasarkan jenis imunisasi yang ada adalah sebagai berikut:

Gambar 2.8



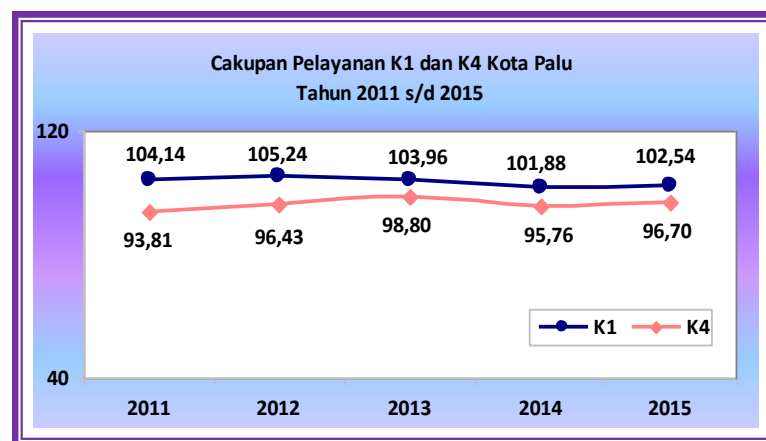
Sumber: Seksi Sepimkesma, 2015

3) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 & K4

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan cakupan K1 dan K4, dimana K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh pelayanan antenatal pertama kali ibu hamil K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali kunjungan sesuai jadwal yang dianjurkan.

Perkembangan cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.9



Sumber: Seksi KIA, 2015

4) Cakupan Kunjungan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi dan balita termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan anak balita.

Tabel 2.16
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Palu Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Target	93	94	96	98	100
Persentase Cakupan	33,82	76,73	97,93	94,42	97,77

Sumber: Seksi KIA, 2015

Selain indikator program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2010-2015, indikator kesehatan yang lain tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Indikator kesehatan lain juga dipergunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Palu. Indikator ini merupakan gambaran capaian kesehatan yang juga merupakan capaian program Dinas Kesehatan Kota Palu dan UPTD-nya.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Capaian Pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Pelayanan Kesehatan Dasar																		
1.	Cakupan Kunjungan Ibu Hami IK4	95%			91	92	93	94	95	93,81	96,43	98,80	95,75	96,71	103,09	104,82	106,24	101,86	101,81
2.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80%			100	100	100	100	100	100	56,65	88,09	44,35	124,32	100	56,65	88,09	44,35	124,32
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%			90	90,5	91	92	93	93,68	96,10	96,75	95,82	95,60	104,09	106,19	106,31	104,15	102,80
4.	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90%								93,71	88,08	92,74	93,51	91,74	-	-	-	-	-
5.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang	80%			87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	100	25,58	64,84	65,49	75,02	114,55	29,31	74,27	75,02	85,94
6.	Cakupan kunjungan bayi	90%			100	100	100	100	100	33,82	76,73	97,39	94,42	97,77	33,82	76,73	97,39	94,42	97,77
7.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%			100	100	100	100	100	97,67	100	100	100	97,78	97,67	100	100	100	97,78
8.	Cakupan pelayanan anak balita	90%			90	95	100	100	100	10,62	52,76	86,13	85,80	84,45	11,80	55,54	86,13	85,80	84,45
9.	Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%								39,98	14,75	21,11	0	0	-	-	-	-	-
10.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%			55	65	75	95	100	86,52	92,63	97,19	98,01	98,38	157,31	142,51	129,59	103,17	98,38
12.	Cakupan peserta KB Aktif	70%			46	50	55	60	70	54,97	56,48	72,07	65,02	53,46	119,51	112,96	131,04	108,36	76,37
13.	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit																		
	a. AFP (/100.000 pddk <15 tahun)	≥2			7	7	7	7	7	8,22	12,37	12,07	12,23	8,65	117,44	176,71	172,40	174,70	123,52
	b. Penemuan penderita Pneumonia	100%			100	100	100	100	100	36,24	74,71	112,55	105,09	187,25	36,24	74,71	112,55	105,09	187,25
	c. Penemuan pasien baru TB BTA+	100%								47,95	48,82	49,38	53,21	58,01	-	-	-	-	-
	d. Penderita DBD yang ditangani	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	e. Penemuan penderita Diare	100%								44,02	46,16	85,59	92,06	89,99	-	-	-	-	-
14.	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%			88	90	95	98	100	111,21	101,08	121,09	140,90	98,00	126,38	112,31	127,47	143,77	98,00
15.	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	100%								30,24	5,26	6,32	16,60	7,06	-	-	-	-	-

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
16.	Cakupan pelayanan gawat darurat level1 yg harus diberikansarana kesehatan(RS) diKab/Kota	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERMENDAGRI																		
1.	Angka kelangsungan hidup bayi		0,66%							0,9939	0,9931	0,9905	0,9938	0,9967	-	-	-	-	-
2.	Angka usia harapan hidup		75,33 tahun							70,26	70,54	70,72	70,82	70,72	-	-	-	-	-
3.	Persentase balita gizi buruk		0,46%		1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,19	0,16	0,21	0,12	0,15	19,00	20,00	30,00	20,00	30,00
4.	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000 balita)		11		7	8	9	10	11	8,8818	5,7322	7,3603	4,6772	6,4280	126,88	71,65	81,78	46,77	58,44
5.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk																		
	1. Puskesmas (/1.000 penduduk)		0,0383							0,0344	0,0329	0,0311	0,0311	0,0361	-	-	-	-	-
	2. Poliklinik (/1.000 penduduk)		0,0224							0,0293	0,0220	0,0207	0,0441	0,0473	-	-	-	-	-
	3. Pustu (/1.000 penduduk)		0,0926							0,0831	0,0797	0,7519	0,7525	0,8343	-	-	-	-	-
6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000 penduduk)		0,4790		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4013	0,3847	0,3629	0,3373	0,3615	401,30	384,70	362,90	337,30	361,50
7.	Rasio dokter per satuan penduduk (/1.000 penduduk)		0,2235		0,25	0,3	0,35	0,40	0,45	0,4414	0,4232	0,4096	0,3658	0,3476	176,56	141,07	117,03	91,45	77,24
8.	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih		100%		100	100	100	100	100	89,35	87,80	88,46	85,80	85,76	89,35	87,80	88,46	85,80	85,76
C.	INDIKATOR KESEHATAN LAINNYA																		
1.	Posyandu Purnama Mandiri			40%	36	37	38	39	40	55,30	59,36	63,18	60,36	63,51	153,61	160,43	166,26	154,77	158,78
2.	Pelayanan KesehatanPra Usia Lanjut dan Usia			60%	42	45	50	55	60	35,85	40,53	27,23	91,69	86,06	85,36	90,07	54,46	166,71	143,43
3.	Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)			100%	100	100	100	100	100	99,6	98,7	99,2	99,5	98,10	99,60	98,70	99,20	99,50	98,10
4.	Bayi Berat Badan Lahir Rendah ditangani			100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Penderita kusta yang selesaiberobat (RFTRate):			100%	91	92	93	94	95	80	100	100	100	100	87,91	108,70	107,53	106,38	105,26
6.	Infeksi Menular Seksual yang diobati			100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
7.	Angka Bebas Jentik (ABJ)			100%	80	85	90	95	100	82,95	84,96	88,01	88,60	97,91	103,69	99,95	97,79	93,26	87,91
8.	Tempat pengelolaan makanan dan minuman (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan			90%	70	75	80	85	90	86,06	91,29	86,89	85,56	92,76	122,94	121,72	108,61	100,66	103,07
9.	Balita yang naik berat badannya (N/D)			100%	80	85	90	95	100	97,08	63,91	80,42	83,47	82,96	121,35	75,19	89,36	87,86	82,96
10.	Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)			75%	55	60	65	70	75	56,62	63,87	64,30	67,16	73,90	102,95	106,45	98,92	95,94	98,53
11.	Bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif			80%	60	65	70	75	80	59,45	55,75	52,03	59,70	67,60	99,08	85,77	74,33	79,60	84,50
12.	Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe			96%	92	93	94	95	96	93,78	94,56	98,80	94,34	95,65	101,93	101,68	105,11	99,31	99,64
13.	Balita mendapat kapsul vitamin A 2x pertahun			100%	89,5	90	93	95	100	87,15	89,71	82,01	84,18	85,83	97,37	108,57	88,18	88,61	85,83
14.	Rata-rata persentase anggaran kesehatan dari APBD Kota Palu			15%	5	8	10	13	15	5,14	13,55	11,56	18,36	17	102,80	106,38	115,60	141,23	113,33
15.	Persentase kota yang membuat profil kesehatan			100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3.3 Anggaran Kesehatan

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsure penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Pemenuhan target pendapatan diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Secara rinci Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18 Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.017.370.367	912.775.697	920.191.200	929.766.145	922.879.877
1.1 Retribusi Jasa Umum Pelayanan Puskesmas	1.017.370.367	912.775.697	920.191.200	899.626.145	922.879.877
1.2 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Non Kapitasi				30.140.000	0
2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	1.879.369.935	1.998.927.919	12.114.907.500	11.837.059.500
2.1 Penerimaan ASKES	0	216.694.305	220.297.415	0	0
2.2 Jamkesmas/Jampersal	0	1.654.722.279	1.716.882.000	1.402.794.000	0
2.3 Jamsostek	0	7.953.351	61.748.504	0	0
2.4 Dana Kapitasi JKN/BPJS	0	0	0	10.267.168.500	10.995.616.000
2.5 Dana Klaim Pelayanan BPJS	0	0	0	444.945.000	1.056.395.000
Jumlah Pendapatan Daerah	1.017.370.367	2.792.145.632	2.919.119.119	13.044.673.645	12.974.890.877

Sumber : Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan

Berdasarkan pada tabel diatas, rata-rata realisasi PAD Dinas Kesehatan Kota Palu pada tahun 2011- 2014 menunjukkan fluktuasi peningkatan, namun pada Tahun 2015 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 0,54%.

b. Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Secara rinci realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Palu

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	02		KESEHATAN	14.986.078.595	11.708.516.469	18.133.043.773	43.317.119.010	44.309.006.240	14.805.050.320	11.208.485.212	17.412.327.831	39.539.094.325	40.123.631.523	98,79	95,73	96,03	91,28	90,55	43,54	39,90
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	713.814.925	825.438.892	1.345.240.699	1.997.830.381	2.351.662.328	700.813.671	823.091.949	1.336.576.862	1.981.065.191	2.317.537.202	98,18	99,72	99,36	99,16	98,55	36,21	36,26
1	02	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air & listrik	57.560.000	61.127.656	115.449.996	103.405.620	184.205.940	44.651.098	58.947.500	107.119.609	89.598.030	173.138.881	77,57	96,43	92,78	86,65	93,99	40,69	47,66
1	02	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	199.452.700	193.527.000	287.250.000	419.875.000	1.187.478.000	199.402.973	193.516.000	287.074.000	419.875.000	1.185.598.000	99,98	99,99	99,94	100,00	99,84	68,61	68,51
1	02	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.900.000	15.300.000	19.200.000	30.000.000	1.200.000	14.900.000	15.300.000	19.200.000	29.790.000	1.200.000	100,00	100,00	100,00	99,30	100,00	(2,89)	(3,16)
1	02	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.100.000	5.980.000	3.850.000	18.000.000	27.000.000	8.100.000	5.925.200	3.850.000	17.990.400	27.000.000	100,00	99,08	100,00	99,95	100,00	88,94	88,87
1	02	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	35.073.825	77.266.753	32.904.649	103.516.825	86.779.368	35.073.825	77.266.753	32.904.649	103.516.825	86.773.716	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	65,33	65,33
1	02	01	11 Penyediaan barang cetakan & penggandaan					19.724.000					19.724.000					100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	01	13 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	8.998.400	34.427.483	94.121.054	78.264.936	11.309.020	8.955.775	34.426.496	93.963.604	75.536.936	11.305.736	99,53	100,00	99,83	96,51	99,97	88,40	88,18
1	02	01	17 Penyediaan makanan & minuman	50.330.000	54.360.000	53.145.000	63.768.000	85.262.000	50.330.000	54.360.000	53.145.000	63.758.000	85.255.000	100,00	100,00	100,00	99,98	99,99	14,87	14,86
1	02	01	18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	339.400.000	383.450.000	739.320.000	1.181.000.000	748.704.000	339.400.000	383.350.000	739.320.000	1.181.000.000	727.541.869	100,00	99,97	100,00	100,00	97,17	32,23	31,79
1	02	01	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	0	0	0	6.236.331.000	0	0	0	0	4.702.022.192	0				75,40	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	02	01	02 Pembangunan gedung kantor				5.891.531.000					4.357.222.192					73,96	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	02	01	03 Pengadaan mobil jabatan				344.800.000					344.800.000					100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.964.150	18.870.544	215.449.336	254.142.504	173.471.200	14.963.750	18.870.544	215.449.332	251.182.504	172.264.200	100,00	100,00	100,00	98,84	99,30	263,51	263,25
1	02	05	02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4.719.400	4.719.400	18.050.000	18.550.000	85.573.400	4.719.000	4.719.400	18.050.000	18.550.000	85.173.400	99,99	100,00	100,00	100,00	99,53	161,64	161,10
1	02	05	04 Penyusunan PAK tenaga fungsional	10.244.750	14.151.144	197.399.336	235.592.504	87.897.800	10.244.750	14.151.144	197.399.332	232.632.504	87.090.800	100,00	100,00	100,00	98,74	99,08	322,43	322,09
1	02	15	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	3.098.091.387	2.554.575.832	3.156.874.393	4.154.942.915	2.869.823.469	3.098.091.387	2.553.313.128	2.914.830.026	4.121.805.532	2.867.071.757	100,00	99,95	92,33	99,20	99,90	1,68	1,89
1	02	15	01 Pengadaan obat & perbekalan kesehatan	3.098.091.387	2.554.575.832	3.156.874.393	4.154.942.915	2.869.823.469	3.098.091.387	2.553.313.128	2.914.830.026	4.121.805.532	2.867.071.757	100,00	99,95	92,33	99,20	99,90	1,68	1,89

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.226.555.070	3.405.850.181	3.384.665.827	13.183.987.386	17.386.570.307	1.177.983.572	2.939.863.956	2.968.200.747	11.129.453.741	14.612.357.076	96,04	86,32	87,70	84,42	84,04	124,61	114,20
1	02	16	01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya	141.940.000	2.256.562.400	2.263.527.225	11.806.903.600	1.613.066.440	141.927.500	1.803.909.650	1.866.738.125	9.756.426.122	1.594.991.440	99,99	79,94	82,47	82,63	98,88	456,35	378,37
1	02	16	02 Pemeliharaan & pemulihan kesehatan	24.629.150	28.690.000	43.985.600	49.005.000	135.494.900	24.629.125	28.690.000	43.985.600	48.900.500	134.744.900	100,00	100,00	100,00	99,79	99,45	64,43	64,13
1	02	16	17 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus & RS	7.085.800	19.379.000	27.891.000	21.254.636	72.724.850	7.062.915	19.379.000	27.889.575	21.244.635	64.804.850	99,68	100,00	99,99	99,95	89,11	108,95	99,88
1	02	16	18 Peningkatan pelayanan kesehatan siswa	93.504.750	91.256.500	91.256.400	89.815.500	49.537.660	93.504.750	89.661.500	91.249.300	89.803.800	47.362.660	100,00	98,25	99,99	99,99	95,61	(12,21)	(12,80)
1	02	16	20 Dukungan operasional Puskesmas	914.883.170	1.001.426.281	958.005.602	1.217.008.650	1.367.010.776	866.347.082	989.687.806	938.338.147	1.213.078.684	1.341.147.643	94,69	98,83	97,95	99,68	98,11	11,12	12,22
1	02	17	Program Pengawasan Obat & Makanan	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,92	50,92
1	02	17	02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,92	50,92
1	02	19	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	375.052.150	393.058.895	883.614.270	1.091.826.850	1.186.490.470	370.680.650	388.498.849	883.337.250	1.084.599.400	1.176.805.470	98,83	98,84	99,97	99,34	99,18	40,46	40,87
1	02	19	01 Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat	6.510.000	14.520.000	127.199.950	415.552.750	488.159.870	6.510.000	14.520.000	126.945.100	409.657.050	481.634.870	100,00	100,00	99,80	98,58	98,66	285,81	284,40
1	02	19	06 Sosialisasi desa siaga	165.528.250	166.211.250	152.585.050	199.206.600	162.675.500	162.773.250	161.731.250	152.568.550	198.114.050	161.015.500	98,34	97,30	99,99	99,45	98,98	1,11	1,21
1	02	19	07 Pemetaan PHBS	95.954.200	106.757.145	326.957.620	176.642.000	224.805.000	94.346.700	106.702.099	326.951.950	176.407.000	224.805.000	98,32	99,95	100,00	99,87	100,00	49,70	50,23
1	02	19	10 Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH)	2.899.700	2.370.500	2.555.600	5.110.500	19.710.100	2.890.700	2.345.500	2.555.600	5.106.300	18.510.100	99,69	98,95	100,00	99,92	93,91	93,80	88,10
1	02	19	13 Pembinaan Posyandu	104.160.000	103.200.000	274.316.050	295.315.000	291.140.000	104.160.000	103.200.000	274.316.050	295.315.000	290.840.000	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	42,78	42,76
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	257.073.973	256.507.600	929.663.200	959.247.200	1.180.737.200	256.992.108	256.507.600	929.661.000	959.235.680	1.180.677.200	99,97	100,00	100,00	100,00	99,99	72,12	72,13
1	02	20	03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang VitA dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya	257.073.973	256.507.600	929.663.200	959.247.200	1.180.737.200	256.992.108	256.507.600	929.661.000	959.235.680	1.180.677.200	99,97	100,00	100,00	100,00	99,99	72,12	72,13
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	43.706.100	68.158.600	205.079.055	218.444.800	122.960.200	43.706.100	68.158.550	202.591.555	218.443.600	122.960.200	100,00	100,00	98,79	100,00	100,00	54,91	54,32
1	02	21	03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	16.117.000	14.363.000	125.126.385	138.485.200	88.254.000	16.117.000	14.363.000	122.686.385	138.485.200	88.254.000	100,00	100,00	98,05	100,00	100,00	183,67	179,98
1	02	21	04 Monitoring, evaluasi & pelaporan	6.405.000	10.525.600	11.045.570	22.500.000	18.040.000	6.405.000	10.525.550	11.045.570	22.500.000	18.040.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	38,29	38,29
1	02	21	09 Penyehatan air	21.184.100	43.270.000	68.907.100	57.459.600	16.666.200	21.184.100	43.270.000	68.859.600	57.458.400	16.666.200	100,00	100,00	99,93	100,00	100,00	18,97	18,96
1	02	22	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	421.203.200	521.623.000	865.184.320	1.278.330.000	1.359.865.913	418.871.700	514.403.059	861.754.635	1.255.645.066	1.354.803.913	99,45	98,62	99,60	98,23	99,63	35,96	35,98
1	02	22	05 Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	255.202.250	340.099.000	680.545.600	1.097.679.600	1.155.641.488	255.202.250	337.321.950	679.557.500	1.075.050.816	1.154.090.488	100,00	99,18	99,85	97,94	99,87	49,99	49,80
1	02	22	08 Peningkatan Imunisasi	56.152.000	55.520.000	54.585.236	53.326.800	42.955.800	56.113.000	55.520.000	54.473.736	53.312.450	39.444.800	99,93	100,00	99,80	99,97	91,83	(6,14)	(7,77)
1	02	22	09 Peningkatan Surveillans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	46.818.200	58.510.000	65.492.400	63.865.000	70.283.000	46.718.200	58.417.109	65.342.065	63.833.000	70.283.000	99,79	99,84	99,77	99,95	100,00	11,12	11,17
1	02	22	12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra	63.030.750	67.494.000	64.561.084	63.458.600	90.985.625	60.838.250	63.144.000	62.381.334	63.448.800	90.985.625	96,52	93,55	96,62	99,98	100,00	11,10	11,92

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	140.195.400	295.203.200	424.976.510	500.269.614	484.396.200	140.195.150	295.203.200	424.327.000	493.738.914	453.707.143	100,00	100,00	99,85	98,69	93,66	42,27	40,64
1	02	23	01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan	71.284.850	76.436.400	168.944.950	133.176.214	263.097.200	71.284.620	76.436.400	168.884.950	127.098.114	250.664.443	100,00	100,00	99,96	95,44	95,27	51,16	50,16
1	02	23	02 Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan	59.581.800	211.236.600	222.455.100	341.221.500	201.354.500	59.581.800	211.236.600	221.878.350	340.887.500	183.798.200	100,00	100,00	99,74	99,90	91,28	68,06	66,78
1	02	23	06 Monitoring, evaluasi & pelaporan	9.328.750	7.530.200	33.576.460	25.871.900	19.944.500	9.328.730	7.530.200	33.563.700	25.753.300	19.244.500	100,00	100,00	99,96	99,54	96,49	70,19	69,47
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	242.500.000	223.750.000	350.000.000	350.000.000	370.000.000	242.500.000	223.750.000	350.000.000	350.000.000	370.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	13,60	13,60
1	02	24	01 Pelayanan Operasi Katarak	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00
1	02	24	03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing	37.500.000	18.750.000				37.500.000	18.750.000				100,00	100,00				#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	24	04 Pelayanan Sunatan Massal	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	120.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	120.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11,25	11,25
1	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya	8.140.093.890	2.828.919.600	5.922.174.163	12.008.234.310	15.711.830.776	8.027.614.807	2.810.400.752	5.875.586.424	11.915.388.655	14.442.026.844	98,62	99,35	99,21	99,23	91,92	44,43	42,02
1	02	25	01 Pembangunan Puskesmas	506.000.000		608.000.000	2.362.100.000	3.529.268.541	462.543.000		605.385.725	2.324.216.000	3.513.444.907			99,57	98,40	99,55	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	02 Pembangunan Puskesmas Pembantu		1.352.750.000					1.342.493.000				#DIV/0!	99,24				#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	07 Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	6.307.340.000	879.383.000	2.692.325.303	4.664.281.403	9.140.398.935	6.255.800.217	873.440.000	2.669.036.100	4.633.175.450	7.904.547.427	99,18	99,32	99,13	99,33	86,48	72,33	65,93
1	02	25	14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas	50.000.000	50.000.000		69.493.047	136.000.000	50.000.000	49.982.152		69.493.047	135.918.500	100,00	99,96		100,00	99,94	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Pembantu				56.250.000	75.000.000				56.250.000	75.000.000				100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Keliling			50.000.000	75.000.000	62.085.200			50.000.000	74.999.549	62.084.910			100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	370.000.000	187.407.000	2.263.050.000	2.576.550.000		364.393.000	185.970.000	2.252.643.589	2.558.471.000		98,48	99,23	99,54	99,30		243,02	243,98
1	02	25	23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	304.753.890	359.379.600	308.798.860	419.748.860	87.623.100	295.806.590	358.515.600	298.521.010	419.514.710	87.623.100	97,06	99,76	96,67	99,94	100,00	(9,84)	(8,53)
1	02	25	24 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	602.000.000			741.720.000	2.395.205.000	599.072.000			739.679.000	2.377.396.000				99,72	99,26	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	27 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Medis dan Paramedis				1.043.091.000	286.250.000				1.039.589.899	286.012.000			99,66	99,92		#DIV/0!	#DIV/0!

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	02	29	Program Pelatihan & Pendidikan Perawatan Anak Balita	18.196.200	18.196.200	49.136.150	49.136.150	46.136.150	18.118.800	18.122.250	49.136.150	48.786.150	46.136.150	99,57	99,59	100,00	99,29	100,00	40,98	41,25
1	02	29	04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	18.196.200	18.196.200	49.136.150	49.136.150	46.136.150	18.118.800	18.122.250	49.136.150	48.786.150	46.136.150	99,57	99,59	100,00	99,29	100,00	40,98	41,25
1	02	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	23.746.000	23.746.000	121.829.200	118.904.150	110.404.150	23.692.475	23.688.650	121.829.200	118.804.150	110.404.150	99,77	99,76	100,00	99,92	100,00	100,88	101,18
1	02	30	01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	23.746.000	23.746.000	121.829.200	118.904.150	110.404.150	23.692.475	23.688.650	121.829.200	118.804.150	110.404.150	99,77	99,76	100,00	99,92	100,00	100,88	101,18
1	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	88.065.800	87.590.800	58.057.650	63.057.650	359.544.577	88.005.800	87.590.800	58.045.650	63.037.650	359.113.918	99,93	100,00	99,98	99,97	99,88	111,13	111,02
1	02	32	04 Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	88.065.800	87.590.800	58.057.650	63.057.650	359.544.577	88.005.800	87.590.800	58.045.650	63.037.650	359.113.918	99,93	100,00	99,98	99,97	99,88	111,13	111,02
1	02	34	Program Kebijakan & Manajemen Pengembangan Kesehatan	161.351.300	167.552.425	202.134.500	809.264.500	513.980.500	161.351.300	167.547.225	202.037.500	802.716.300	456.633.500	100,00	100,00	99,95	99,19	88,84	72,09	69,66
1	02	34	01 Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan	66.920.050	74.635.600	94.016.200	485.785.700	390.212.000	66.920.050	74.630.400	94.016.200	479.265.200	332.865.000	100,00	99,99	100,00	98,66	85,30	108,63	104,18
1	02	34	02 Penyusunan Profil Kesehatan	47.502.150	37.321.050	49.196.000	228.110.900	50.319.500	47.502.150	37.321.050	49.140.600	228.089.150	50.319.500	100,00	100,00	99,89	99,99	100,00	74,03	74,11
1	02	34	03 Penyusunan Perencanaan Dinkes Kota Palu	46.929.100	55.595.775	58.922.300	95.367.900	73.449.000	46.929.100	55.595.775	58.880.700	95.361.950	73.449.000	100,00	100,00	99,93	99,99	100,00	15,83	15,84

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinkes Kota

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015 terjadi fluktuasi pagu anggaran yang juga berimbas pada berfluktuasinya realisasi anggaran dalam setiap tahunnya. Dengan melihat rasio antara realisasi dan anggaran dalam setiap tahun terjadi penurunan namun bukan berarti dikatakan tidak baik atau kurang baik karena jika dilihat trend capaian serapan tiap tahunnya masih $\geq 90\%$. Tingginya serapan anggaran sedikit banyak dipengaruhi oleh kegiatan pemenuhan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kegiatan bantuan operasional kegiatan Puskesmas serta kegiatan administrasi perkantoran rutin lainnya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga(K/L) dan Renstra Dinkes Propinsi

Berdasarkan analisis keadaan eksternal Dinas Kesehatan Kota Palu akan dapat diidentifikasi faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang mempengaruhi strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Palu.

Faktor eksternal pada dasarnya adalah merupakan faktor yang ada di sekeliling Dinas Kesehatan, yang dapat terdiri atas kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, lingkungan fisik, lingkungan hidup, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, demografi, stakeholders dan lain-lain.

Tabel 2.20
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kota Palu terhadap Sasaran Renstra Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementerian

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kota Palu	Sasaran pada Renstra Dinkes Propinsi	Sasaran pada Renstra Kemenkes RI
1.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) yang memiliki kompetensi	Capaian cakupan Linakes Tahun 2015 adalah 95,60% Angka ini diatas target yang ditentukan 93%	Capaian cakupan Linakes Tahun 2015 adalah 73,50%. Angka ini belum mencapai target yang ditentukan 90%	
2.	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Capaian cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Tahun 2015 adalah 96,71%. Angka ini diatas target 95%	Capaian Kunjungan K4 Tahun 2015 adalah 74%. Angka ini belum mencapai target 95%	
3.	Cakupan kunjungan bayi	Capaian cakupan kunjungan bayi Tahun 2015 adalah 97,77%. Angka ini belum mencapai target yang ditentukan 100%	Capaian Kunjungan bayi Tahun 2015 adalah 62,2%. Angka ini masih jauh dari target renstra propinsi yaitu 90%	
4.	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Capaian cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100%, sesuai target yang ditentukan.	Capaian balita gizi buruk yang ditangani Tahun 2015 adalah 97,7%. Angka ini sudah hampir mencapai target	
5.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah 100%, sesuai target yang ditentukan.		

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kota Palu	Sasaran pada Renstra Dinkes Propinsi	Sasaran pada Renstra Kemenkes RI
6	Cakupan kelurahan KLB yang ditangani < 24 jam	Capaian cakupan kelurahan KLB yang ditangani < 24 jam adalah 100%, sesuai target yang ditentukan.	Capaian cakupan kelurahan KLB yang ditangani < 24 jam Tahun 2015 adalah 100%, sesuai target yang ditentukan dalam renstra.	Capaian Cakupan kelurahan KLB yang ditangani < 24 jam adalah 100%, sesuai target 100%
7.	Cakupan imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan : (BCG, DPT1+HB1, DPT3+HB3, Polio 4, Campak)	Capaian cakupan imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan Tahun 2015 adalah: BCG : 78,53%; DPT3+HB3 : 79% ; Polio : 79,38% ; Campak : 78,38% Capaian belum mencapai target 85%.	Cakupan UCI Tahun 2015 adalah sebesar 80,3%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan 84%	

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan hasil analisis struktur ruang wilayah Kota Palu sesuai Perda Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang RT RW Tahun 2010-2030, rencana kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung pengembangan berbasis ekologi yang mendukung fungsi kawasan seperti kawasan lindung, pemukiman, kawasan industri, jasa dan perdagangan. Hasil analisis struktur ruang wilayah Kota Palu terkait dengan pembangunan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Palu

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1.	Terwujudnya Ruang wilayah kota yang berdaya saing global berbasis ekologi		Fokus strategis aspek kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan kawasan lingkungan	1. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, untuk aspek kesehatan diharapkan dapat mendukung fungsi kawasan berbasis ekologi	1. Dinas kesehatan menyiapkan pelayanan kesehatan pada masyarakat sesuai rencana pengembangan kawasan pemukiman yang terkait dengan pengembangan kawasan industri, jasa dan perdagangan serta kawasan rawan bencana
				2. Pengembangan kawasan pemukiman, industri, jasa dan perdagangan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan	2. Kondisi saat ini adalah puskesmas/pustu tersedia dikawasan pemukiman penduduk

Tabel 2.22
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Palu

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1.	Terwujudnya strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau		Menetapkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan ruang terbuka hijau	Berdasarkan pola rencana tata ruang wilayah, untuk aspek kesehatan diharapkan dapat mendukung fungsi kawasan ruang terbuka hijau	Tersedianya fungsi ruang terbuka hijau ditempat sarana pelayanan kesehatan
2.	Terwujudnya strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya (pendidikan, kesehatan dll)		Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berhierarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan	Pengembangan sarana pelayanan kesehatan harus memenuhi standar pelayanan	Tersedianya puskesmas yang telah terakreditasi diseluruh kawasan kotaPalu

2.4.3 Analisis terhadap Dokumen KLHS sesuai Pelayanan Dinas Kesehatan

Rekomendasi isu strategis KLHS, didasarkan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), yang merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangan dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat : 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi : 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten : 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222

Proses Penilaian dan Analisis mengenai capaian setiap indikator untuk masing-masing TPB mengacu pada target nasional RPJMN 2019. Adapun Kondisi data yang didapatkan melalui penyelenggaraan KLHS Revisi RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 ditunjukkan dalam tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.23
Jumlah dan Presentasi Capaian Indikator TPB Kota Palu Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria Capaian Indikator	Jumlah Indikator	%
1.	Indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	91	36,36
2.	Indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	49	22,73
3.	Indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)	3	0,83
4.	Indikator belum memiliki data (NA)	95	39,67
5.	Indikator tidak relevan dengan karakteristik daerah	1	0,41
	Jumlah	239	100

2.4.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Peluang

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang memberikan ruang gerak yang lebih leluasa dalam manajemen pelayanan kesehatan;
2. Perencanaan pembangunan berwawasan kesehatan oleh Presiden yang dapat dijadikan bahan advokasi bagi sektor lain;
3. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah melalui gerakan-gerakan yang dipelopornya;
4. Adanya bantuan luar negeri baik bantuan yang bersifat hibah (*grant*) maupun pinjaman (*loan*);
5. Tersedianya institusi pendidikan tenaga kesehatan di Kota Palu sebagai produsen tenaga kesehatan;
6. Tingkat pendidikan yang semakin membaik dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman konsep sehat dan sakit masyarakat;
7. Aksesibilitas yang tinggi dari masyarakat akan informasi kesehatan melalui media komunikasi cetak dan elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai peluang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masalah-masalah kesehatan.

b. Tantangan

1. UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004 akan menjadi ancaman apabila tidak didukung oleh kesiapan jajaran kesehatan dalam melakukan advokasi terhadap *stakeholders*;
2. Koordinasi dengan lintas sektor masih lemah;
3. Tingginya angka kemiskinan;
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan;
5. Dampak globalisasi dan perdagangan bebas menuntut kualitas SDM yang tinggi karena persaingan penyediaan tenaga dan pelayanan kesehatan dari luar negeri;

6. Kebiasaan masyarakat yang masih melekat erat di masyarakat sehingga belum mendukung secara maksimal perilaku sehat;
7. Terjadinya transisi demografi dan transisi epidemiologi penyakit mengakibatkan beban ganda dalam penanggulangan masalah kesehatan;
8. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan terdekat di masyarakat masih belum optimal sehingga belum menjadi pintu masuk peran serta masyarakat;
9. Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mewajibkan Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melaksanakan dan mencapai target dari SPM tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategi ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal organisasi.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Kesehatan di Kota Palu

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kesehatan lingkungan dan masyarakat	a) Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat; b) Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan, perilaku konsumsi serta jenis makanan c) Akses sanitasi yang layak di pemukiman penduduk	a) Peningkatan penyakit berbasis lingkungan, akibat kerja dan lingkungan kerja b) Kondisi sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat dan perilaku yang berpotensi menimbulkan bencana c) Rasio Tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih rendah
2.	Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	a) Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan; b) Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia; c) Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional; d) Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan; e) Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit lainnya (berbasis lingkungan & akibat kerja dan lingkungan kerja).	d) Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan-bahan makanan yang sehat e) Adanya produk-produk yang beredar yang belum bersertifikat dan sesuai standar kesehatan f) Kurangnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat g) Kecukupan sarana kesehatan Puskesmas, Pustu belum sesuai standar
3.	Ketersediaan, standar isasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	a) Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder b) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	h) Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kesehatan dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis			Lain-lain
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	
1.	<p>Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberlakuan ASEAN Community akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus merupakan tantangan tersendiri terutama berkaitan dengan liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan. 	<p>Upaya peningkatan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya. 	<p>Upaya peningkatan mutu layanan dan sumber daya manusia kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan standarisasi pelayanan pada fasilitas pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan penerapan ISO, GKM, dan akreditasi Puskesmas serta melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petugas kesehatan secara berkesinambungan. 	
2.	<p>Pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang dimulai pada Tahun 2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan keberhasilan SDGs selama 15 tahun ke depan tidak berbeda jauh dengan MDGs yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. 	<p>Upaya akselerasi kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian indikator Sustainable Development Goals (SDGs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan program dan pengintegrasian kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator SDGs diantaranya adalah penurunan AKI dan AKB, masalah gizi, masalah penyebaran penyakit menular dan akses sanitasi yang layak. <p>Disparitas status kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir 4 kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di 	<p>Penguatan kegiatan yang memberikan daya ungkit kepada pencapaian indikator SDGs;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan akselerasi kegiatan dalam rangka pencapaian indikator SDGs, meliputi: 1) Penurunan Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk; 2) Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita; 3) Pemberian Imunisasi Campak pada Bayi; 4) Penurunan Angka Kematian Ibu; 5) Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan; 6) Penurunan Prevalensi HIV-AIDS; 7) Penurunan Prevalensi Penyakit Malaria; 8) Peningkatan CDR dan Cure Rate penderita TB; 9) Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak; 10) Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak. <p>Belum tercapainya beberapa indikator derajat kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian ibu di Kota Palu masih berfluktuasi tingginya meskipun pernah berada dibawah target nasional dan SDGs. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan yang dapat dilihat dengan masih rendahnya angka D/S (parameter Posyandu). 	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
		kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.		
		<p>Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada Tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage-UHC). 	<p>Dampak dari Pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberlakuan JKN menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran yang diperlukan maka upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif perlu digalakkan agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. 	

3.2 TELAAHAN TERHADAP VISI MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Saat ini Kota Palu masuk dalam tahap ke-3 pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025 yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pencapaian visi tahapan ketiga perlu didukung oleh arah dan sasaran pembangunan jangka menengah yang juga harus mendukung pernyataan visi tersebut.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Palu Tahun 2016-2021, yaitu:

**“PALU KOTA JASA BERBUDAYA DAN BERADAT
DILANDASI IMAN DAN TAQWA”**

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah Kota Palu. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang diharapkan menjadi acuan Pemerintah Kota Palu membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara serta kedudukan hirarki kota sebagai pusat aktivitas kaum urban.

Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah mengacu pada realitas masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang bercirikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan pembangunan Kota yang melayani dan dinikmati oleh warganya bercirikan harmonis dalam keragaman. Penelaahan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan dalam penjelasan Visi sebagaimana berikut:

a. PALU sebagaimana dimaksud dalam visi tersebut adalah:

Kota Tiga Dimensi (teluk, sungai, dan bukit/gunung) yang memiliki keunggulan komparatif dan dihuni oleh beberapa etnis, dimana suku kaili sebagai etnis lokal yang memiliki karakteristik budaya beragam dan unik, serta dapat berdampingan dengan budaya lainnya yang memungkinkan Palu menjadi Kota Destinasi.

b. KOTA JASA sebagaimana dimaksud dalam visi tersebut adalah:

Terwujudnya Kota Palu sebagai Kota yang unggul dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui penciptaan kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis Iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan.

Sebutan Kota Palu sebagai Kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota transit dan perdagangan, karena kota transit dan perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai

bidang.

Indikator capaian Palu Kota Jasa dapat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat yang mencerminkan meningkatnya layanan pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Meningkatnya daya beli masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya perekonomian masyarakat khususnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada industri mikro

c. BERBUDAYA DAN BERADAT sebagaimana dimaksud dalam visi tersebut adalah:

Mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Palu sejalan dengan pemahaman nilai-nilai karakter kebangsaan, yang lebih mengedepankan budaya dalam konteks seni tradisional, adat istiadat, dan nilai (toleransi, kekeluargaan, gotong royong).

Indikator capaian berbudaya beradat dalam visi ini tercermin dari:

- 1) Meningkatnya pelestarian nilai budaya dan adat yang tercermin dari tumbuhnya pagelaran seni, budaya tradisional dan adat istiadat dalam tatanan kehidupan masyarakat
- 2) Menurunnya konflik sosial di masyarakat Kota Palu yang mencerminkan meningkatnya nilai-nilai toleransi dan gotong royong masyarakat.

d. IMAN DAN TAQWA sebagaimana dimaksud dalam visi tersebut adalah:

Mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Palu mendorong kehidupan sosial kemasyarakatan yang berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan pemahaman nilai-nilai religius.

Indikator beriman dan bertaqwa sebagai landasan pembangunan Kota Palu adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dicerminkan dari meningkatnya kerukunan umat beragama meliputi kerukunan antar umat beragama, kerukunan internumat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
- 2) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Uraian Visi dan pokok-pokok visi diatas, memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik dan jelas karena memuat penjabaran kriteria dan indicator keberhasilan untuk mewujudkan visi.

Dilihat dari Visi Pemerintah Kota Palu yaitu **Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Taqwa** mempunyai konektivitas dengan sasaran RPJPD Kota Palu yaitu **City for All (Kota Palu Untuk Semua)** yang menitikberatkan menciptakan kota yang mampu memberikan layanan yang diinginkan dan diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakatnya, yang diuraikan dalam bentuk point-point sebagai berikut:

1. Kota yang dapat melayani warganya secara adil;
2. Kota yang aman, tertib, bersih, sejuk dan layak di tempati;
3. Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mensejahterakan warganya;
4. Kota yang terbuka dan membahagiakan bagi yang dating dan yang menetap;
5. Kota yang harmoni dalam keberagaman;
6. Kota yang menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan antara sesama umat beragama, antar etnis dan antar budaya.

Visi Kota Palu Tahun 2016–2021 juga berorientasi dalam membangun kota yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui tata kehidupan yang berbudaya dan beradat serta dengan dilandasi oleh iman dan taqwa.

Sebagai sasaran antara pencapaian visi diatas, telah ditetapkan pula misi yang akan diemban baik oleh pemerintah maupun segenap komponen masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Konsep

penyusunan Misi dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2016–2021 berlandaskan pada pemahaman kondisi yang diinginkan, dimana Misi merupakan tahapan rencana pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kompetensi segenap sumberdaya menuju *Kota Untuk Semua*, sesuai dengan Visi RPJPD Kota Palu 2005–2025.

Misi disusun dengan memperhatikan faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka visi di atas dijabarkan ke dalam 6 (enam) Misi sebagai berikut :

MISI I : Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis Informasi Teknologi (IT).

MISI 2 : Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya manusia.

MISI 3 : Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan.

MISI 4 : Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya.

MISI 5 : Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya.

MISI 6 : Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa.

□ Misi I : Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT

Misi ini merupakan pelaksanaan pilar sistem informasi dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Palu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Pada era informasi teknologi saat

ini, peran sebuah sistem informasi dalam pengelolaan sumberdaya daerah sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan kepala daerah yang dihadapkan pada banyaknya sumberdaya yang dimiliki.

Keberadaan sistem informasi potensi daerah berbasis IT diharapkan akan memberikan gambaran potensi sumberdaya manusia, alam, sosial, budaya, sarana dan prasarana, keuangan, dan serta ekonomi yang dimiliki Kota Palu.

Sasaran pokok dalam misi ini adalah pemerintah Kota Palu memiliki Pusat Data dan Informasi berbasis *Geografy Information System* (GIS). Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Palu akan memfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** pertama sebagai berikut:

1. Penciptaan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS;
2. Survey Potensi Sumberdaya Kota Palu;
3. Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu pada SKPD dan Kelurahan.

- Misi 2 : Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dilakukan perbaikan di tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan penguatan agama. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan penguatan agama bagi sumber daya manusia dapat terlaksana jika pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta kebijakan yang mendukung kemudahan masyarakat untuk mengakses ketiga hal tersebut.

Penyediaan layanan pendidikan, kesehatan berkualitas, mudah dan terjangkau merupakan langkah strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah Kota Palu saat ini. Penguatan agama bagi seluruh masyarakat perlu menjadi bagian tanggung jawab moral pemerintah daerah melalui kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk dapat

lebih banyak mempelajari agama di pendidikan formal maupun non formal.

Untuk mencapai misi kedua maka pemerintah Kota Palu akan untuk mengfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** kedua sebagai berikut:

1. Pendidikan terjangkau dan berkualitas;
2. Pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas;
3. Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan Agama dan Budaya;
4. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan berbasis potensi sumberdaya lokal.

□ Misi 3 : Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah Kota Palu saat ini lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi yang diciptakan dari pertumbuhan usaha kecil atau usaha mikro di tiap wilayah terkecil, dalam hal ini Kelurahan. Pemerintah Kota Palu berkeinginan untuk mengembangkan Kelurahan menjadi basis awal perkembangan ekonomi kerakyatan yaitu Kelurahan yang memiliki inovasi tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta dapat mengembangkan ekonomi masyarakat yang didukung oleh informasi dan teknologi.

Untuk mencapai misi ketiga maka pemerintah Kota Palu akan untuk mengfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** ketiga sebagai berikut:

1. Peningkatan ketrampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan;
2. Peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mendorong dan meningkatkan ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan;

4. Mendorong investasi berbasis potensi sumberdaya local yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- Misi 4 :Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis Budaya

Reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Palu dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen), peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, system dan prosedur tatalaksana yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia, baik ditingkat Kelurahan maupun Kecamatan serta kemudahan pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai misi keempat, pemerintah akan mengfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran

Sub Misi keempat sebagai berikut :

1. Penataan dan Rasionalisasi Kelembagaan;
2. Penataan dan Rasionalisasi Tata Laksana;
3. Penataan dan Rasionalisasi Sumberdaya Birokrasi;
4. Penataan dan Rasionalisasi Program, kegiatan dan anggaran.

- Misi 5 : Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya

Pemerintah Kota melalui misi ini berupaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan menyenangkan melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur akan berorientasi pada budaya atau untuk meningkatkan identitas budaya Kota Palu yang akhirnya akan mendukung pariwisata.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai misi kelima, pemerintah akan mengfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** kelima sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan pelayanan transportasi Kota;
2. Peningkatan dan pengembangan dekorasi Kota berbasis budaya;
3. Penataan dan Peningkatan fungsi ruang-ruang publik Kota berbasis budaya;
4. Penataan manajemen kebersihan dan keindahan Kota berbasis budaya;
5. Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat wisata berbasis budaya;
6. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan.

□ Misi 6 :Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa

Merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar iman dan taqwa yang difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradab, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, toleransi harmonis dalam keberagaman, sadar lingkungan, dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara Kota Palu sebagai kota berbudaya dan beradab yang dilandasi oleh iman dan taqwa.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai misi keenam adalah mengfokuskan sasaran berdasarkan penjabaran **Sub Misi** keenam sebagai berikut :

1. Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial;
2. Pengembangan dan peningkatan nilai-nilai kearifan lokal;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga seni budaya.

Berdasarkan telaahan pada visi dan misi kepala daerah, Dinas Kesehatan terkait secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah terutama pada Misi ke 2 yaitu **“Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia”** dengan sub misi **“Pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas”**.

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Palu tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, karena dalam hal ini Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD Teknis bidang kesehatan di Propinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di propinsi. Demikian pula untuk kebijakan Propinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Kota Palu diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan ditingkat Pusat dan Propinsi. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Visi

Tabel 3.3
Telaahan Visi Kementerian Kesehatan dan Dinkes Propinsi Sulawesi Tengah

Kemenkes RI	Dinkes Prop Sulteng 2016-2021
Kementerian Kesehatan tidak mempunyai visi sendiri tetapi mengikuti visi Presiden RI: “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	“ Mewujudkan pelayanan kesehatan prima menuju Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing”

3.3.2 Misi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Upaya

untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, memperkuat jati diri Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakterbangsa;
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasisosial Indonesia.

Misi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah secara jelas menggambarkan visi Dinas Kesehatan yang menjadi cita-cita upaya kesehatan dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan. Misi tersebut adalah:

1. Mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan;
2. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif;
3. Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas & berkeadilan;
4. Memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.

Dalam penentuan misi, Dinas Kesehatan Kota Palu perlu memperhatikan misi Presiden Republik Indonesia dan prioritas pembangunan Nawa Cita dari Kabinet Kerja, serta Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah untuk keselarasan.

Tabel 3.4
Keselarasan Pokok-pokok Misi Pemerintah Pusat, Dinkes Propinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Pusat	Dinkes Prop Sulteng 2016-2021
<p>Pokok Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia - Meningkatkan produktifitas rakyat - Mewujudkan bangsayang daya saing internasional - Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju dan kuat - Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis 	<p>Pokok Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan; - Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif; - Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dan berkeadilan; - Memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.

3.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan pada Tahun 2015-2019, yaitu:

- 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
- 2) Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko social dan financial dibidang kesehatan.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah :

- 1) Meningkatnya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya Pengendalian Penyakit;
- 3) Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- 5) Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan;
- 6) Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga;
- 7) Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;
- 8) Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi;
- 9) Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 10) Meningkatnya tata kelola ke pemerintahan yang baik dan bersih;
- 11) Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan;
- 12) Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah;

- 2) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;
- 3) Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja;
- 4) Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- 5) Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
- 7) Terwujudnya sistem informasi dan surveilans kesehatan serta pengembangan riset operasional kesehatan;
- 8) Terwujudnya peningkatan jaminan dan pembiayaan kesehatan masyarakat.

Keselarasan Tujuan dan Sasaran pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Keselarasn Pokok-pokok Tujuan dan Sasaran Pemerintah Pusat,
Dinkes Propinsi Sulawesi Tengah dan Dinkes Kota Palu

Pemerintah Pusat 2014-2019	Dinkes Kota Palu 2016-2021	Dinkes Prop Sulteng 2016-2021
<p>Pokok Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan status kesehatan masyarakat; - Meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat bidang kesehatan. <p>Pokok Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, akses dan mutu pelayanan kesehatan; - Meningkatnya tata kelola , kompetensi dan sistem Informasi kesehatan. 	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 	<p>Pokok Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya status kesehatan masyarakat; - Mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan, melalui pelayanan promotif dan preventif; <p>Pokok Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat; - Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja; - Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di masyarakat; - Terwujudnya sistem informasi dan surveilans kesehatan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI, maka hasil telaahan terhadap beberapa permasalahan dibidang kesehatan maka beberapa faktor penghambat dan pendorong bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu berdasarkan Sasaran
Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan SKPD Kota	Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan	Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi	Adanya dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Kesadaran masyarakat Tentang kebersihan lingkungan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan	Penyakit akibat mobilitas penduduk dan penyakit lainnya (berbasis lingkungan & akibat kerja dan lingkungan kerja).	Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau perbaikan layanan kesehatan
3.	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Adanya puskesmas Yang belum terakreditasi	Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau perbaikan layanan kesehatan
4.	Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan	Ketersediaan dan tata kelola Obat dan perbekalan kesehatan dipuskesmas/pustu perlu ditingkatkan	Tata kelola obat dan perbekalan kesehatan dipuskesmas/pustu perlu dioptimalkan	Anggaran untuk pelayanan kesehatan cukup tinggi
5.	Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan	Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas khususnya untuk ibu dan anak perlu ditingkatkan	Jumlah SDM Kesehatan kurang	Kompetensi SDM kesehatan dan sarana layanan kesehatan cukup baik
6.	Meningkatnya Sinergitas antar Kementerian/ Lembaga	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Adanya kebijakan Pusat yang sulit diterapkan di daerah	Dukungan Pemerintah Pusat dalam regulasi pelayanan kesehatan dan perijinan bidang kesehatan
7.	Meningkatnya Daya guna kemitraan dalam dan luar negeri	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Munculnya Persepsi yang berbeda	Dukungan organisasi akademisi, instansi swasta dan LSM serta organisasi profesi dalam implementasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan SKPD Kota	Penghambat	Pendorong
8.	Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Adanya kebijakan Pusat yang sulit diterapkan di daerah	Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau perbaikan layanan kesehatan
9.	Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Ketersediaan anggaran untuk penelitian di daerah kecil	Adanya inovasi program unggulan untuk layanan kesehatan
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Pembinaan dan Pengawasan yang belum optimal	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan
11	Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal	Kompetensi SDM cukup
12	Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan sertasistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Perkembangan Tehnologi yang integrasi dari pusat kadang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah	Pemanfaatan perkembangan tehnologi informasi untuk peningkatan pelayanan termasuk sistem informasi perijinan

Berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, maka telaahan terkait permasalahan pelayanan kesehatan diKota Palu beserta faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu berdasarkan
Renstra Propinsi Sulawesi Tengah Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan

No	SasaranJangka Menengah Renstra SKPD Propinsi	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Akses layanan kesehatan Yang terjangkau dan berkualitas perlu ditingkatkan	Mobilitas penduduk Yang cukup tinggi	KompetensiSDM Kesehatan dan sarana layanan kesehatan cukup baik
2	Terwujudnya tata kelola dan tertib administrasi serta manajemen keuangan	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Pedoman standarisasi penyelenggaraan manajemen dan tata kelola di sarana pelayanan kesehatan belum ada	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan di Kota Palu, diketahui terdapat beberapa isu strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

Tabel 3.8
Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas
pada Setiap Pilar yang berkaitan dengan kesehatan

TPB	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target dan belum ada data	Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup
<p>Tujuan 3: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. ● Deteksi dini epidemi AIDS, TB, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. ● Masih adanya keterbatasan akses layanan kesehatan ● Cakupan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. ● Kontrol dan pengendalian penduduk berkaitan umur \geq 15 tahun yang merokok, penduduk pengguna alkohol dan narkotik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Masih adanya keterbatasan akses layanan kesehatan ● Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan ● Penumpukan sampah, Pencemaran lingkungan dan Drainase belum memadai mengakibatkan permasalahan kesehatan lingkungan

Dari hasil identifikasi isu strategis dan program prioritas, maka disusun mitigasi, adaptasi, alternatif dan rekomendasi bagi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

- a) Pengembangan industri kecil dan menengah berwawasan lingkungan dengan melakukan mitigasi/adaptasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkannya melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong, pengendalian banjir, pembinaan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelembagaan adat.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata berwawasan lingkungan dengan melakukan mitigasi/adaptasi/alternative dampak social ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkannya melalui peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) peningkatan sarana dan prasarana persampahan, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong pengendalian banjir, serta pengembangan pariwisata untuk mewujudkan Palu sebagai kota destinasi.

- c) Pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses kelancaran perekonomian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan melakukan mitigasi/adaptasi/alternative dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkannya, melalui pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawadan jaringan pengairan lainnya serta pengendalian banjir.

Dengan adanya telaahan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka perlu mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Kota Palu dalam pengembangan pelayanan kesehatan selanjutnya agar dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat Kota Palu yang optimal.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan, juga merupakan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021 telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :

- a. Melakukan forum diskusi (*Focussed Group Discussion/FGD*) untuk menentukan permasalahan atau alternative permasalahan yang dihadapi yang merupakan faktor internal (kekuatan dankelemahan OPD) dan eksternal (peluang dan ancaman/tantangan OPD);
- b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah ditentukan;
- c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan;
- d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagai isu strategis

Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, maka penentuan isu-isu strategi Dinas Kesehatan Kota Palu sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan layanan masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu yang merupakan tugas utama pemerintah untuk dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi
2. Pemerintah berupaya mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan dengan mengupayakan tersedianya jumlah sarana dan prasarana kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, karena kualitas kesehatan masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Semakin besar *universal coverage* jaminan kesehatan akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas, sehingga pemerintah Kota

Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin.

4. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemahaman kesehatan kepada masyarakat melalui program-program promosi kesehatan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan didorong dengan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Dan juga ketersediaan sanitasi yang memadai, jaringan air bersih yang digunakan, pengolahan limbah keluarga serta pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.
5. Penurunan masalah kesehatan akibat kondisi sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta perilaku masyarakat berpotensi menimbulkan bencana yang meliputi kematian ibu dan bayi, gangguan gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular dan permasalahan kesehatan khusus.
6. Komitmen untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan antara lain melalui perbaikan tata kelola baik Sumber Daya Manusia, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana serta penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Perumusan tujuan dan sasaran strategis harus memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Walikota selama 5 (lima) tahun periode kepemimpinan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan yaitu **meningkatkan derajat kesehatan**, Dinas Kesehatan Kota Palu telah merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2016-2021, demi mencapai Misi ke-2 Pemerintah Daerah yaitu **Peningkatan dan pengembangan daya saing potensi sumberdaya manusia**.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan yaitu **“Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat”** dengan sasaran **“Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan”**.

Prioritas pembangunan yang sesuai dengan Misi ke-2 terkait dengan pembangunan kesehatan di Kota Palu yaitu :

1. Membangun fasilitas kesehatan yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
3. Mendorong pemerataan kuantitas dan kualitas kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau.

Selain melaksanakan Misi ke-2 yang berkaitan langsung dengan kesehatan, OPD Dinas Kesehatan Kota Palu juga melaksanakan Misi ke-4 yaitu **Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya** dalam menunjang kelancaran birokrasi pemerintah yang efisien yang berdampak langsung pada membaiknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di fasilitas kesehatan yang ada.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun		Target Kinerja pada Tahun		
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan dan pengembangan daya saing potensi. sumber daya manusia	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	69,93	70,31	70,44	70,56	70,69

Sumber : RPJMD-Perubahan 2016-2021 (IKU PEMDA Kota Palu 2016-2021)

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – IKU DINAS KESEHATAN
yang mendukung pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Baik (80)	Baik (82)	Baik (84)	Baik (86)	Sangat Baik (89)
			2. Prevalensi balita gizi buruk	0,66	0,62	0,58	0,54	0,50
			3. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100	100	100	100	100
			4. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30	97,83	100	100	100

Sumber : RPJMD-Perubahan 2016-2021 (IKU Dinkes Kota Palu 2016-2021)

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu
(Indikator Panambahan Misi IV)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	(% Target Kinerja pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	CC	CC	B	BB	A

Sumber : RPJMD-Perubahan 2016-2021 (Indikator Kinerja Misi 4))

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipejelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD selama 5 tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menja ditugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Strategi yang diambil Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas;
2. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan.

Adapun arah kebijakan yang diambil untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2016–2021 di Kota Palu dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau melalui jaminan kesehatan daerah;
3. Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian;
4. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat;
5. Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB);

6. Meningkatkan promosi kesehatan / Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
7. Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju univesal coverage.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016–2021

Visi Walikota Palu : “Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradab Dilandasi Iman dan Taqwa”			
MISI 2 : Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Potensi Sumberdaya Manusia			
Sub Misi 2 : Pelayanan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan: Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau melalui jaminan kesehatan daerah 3. Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian 4. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat 5. Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB)
		2. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan promosi kesehatan / Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 7. Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju universal coverage

MISI 4 : Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Melakukan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyajian program prioritas disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan yang berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program/kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program/Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan tergolong ke dalam urusan pemerintahan wajib.

Memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Misi, tujuan serta sasaran strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2016-2021 maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Sasaran : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Tujuan : Meningkatnya sarana prasarana aparaturnya
Sasaran : Tersedianya sarana prasarana aparaturnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan : Meningkatnya profesionalisme Sumber daya Aparatur
Sasaran : Tersedianya aparaturnya yang memiliki kompetensi dan terdistribusi secara merata

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tujuan : Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan capaian keuangan Dinas Kesehatan
Sasaran : Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan capaian keuangan setiap bulan

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tujuan : Melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan dan penyalahgunaan

obat dan zat terlarang dan juga terlaksananya penyediaan alat kesehatan.

Sasaran : Terkendalinya penyaluran obat, Napza dan terbebasnya masyarakat dari penyalahgunaan obat dan zat terlarang, serta penyediaan alat kesehatan

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan mutu kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kota Palu

Sasaran : Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan : Terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan standar

Sasaran : Terlindunginya masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan : Terwujudnya lingkungan sehat serta peran serta masyarakat dalam mempromosikan lingkungan sehat

Sasaran : Tercapainya masyarakat sadar lingkungan sehat

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi, meningkatkan pelayanan, menurunkan prevalensi gizi kurang dan lebih, serta meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan bermutu untuk memantapkan gizi

Sasaran : Tercapainya masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan : Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat dalam perilaku lingkungan sehat dan hidup bersih

Sasaran: Terciptanya keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai oleh perilaku hidup sehat dan bersih

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tujuan : Meningkatkan pelayanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan tidak menular
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tujuan : Meningkatkan standar pelayanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat
Sasaran : Meningkatnya standar pelayanan kesehatan yang sesuai prosedur
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara adil dan merata
Sasaran : Terciptanya kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas jangkauan kesehatan yang merata dan bermutu
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan anak Balita
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan anak Balita
16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan para lanjut usia
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan dan mutu kehidupan Lansia untuk masa tua yang bahagia dan berdayaguna
17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Tujuan : Meningkatkan keselamatan ibu dan anak dalam persalinan
Sasaran : Meningkatnya tingkat keselamatan ibu dan bayi sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja dan target capaian kinerja yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		1	02		KESEHATAN			43.659.115.851		62.740.114.022		67.334.113.236		85.014.919.297		81.055.527.836		339.696.127.742		DINAS KESEHATAN	
		1	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	6.625.000	100%	176.797.000	100%	178.564.970	100%	180.350.620	100%	182.154.126	100%	724.491.716		
		1	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya			2 Orang	160.000.000	2 Orang	161.600.000	2 Orang	163.216.000	2 Orang	164.848.160	2 Orang	649.664.160		
		1	02	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Perda yang dibuat		1 Perda	4.000.000	0	0	0	1 Perda				1 Perda	4.000.000		
		1	02	05	04	Penyusunan PAK tenaga fungsional	Jumlah PAK tenaga fungsional kesehatan yang disusun		20 Pak	2.625.000	50 Pak	16.797.000	50 Pak	16.964.970	50 Pak	17.134.620	50 Pak	17.305.966	50 Pak	70.827.556	
		1	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	0%	0%	0	0%	0	0%	107.662.500	0%	118.428.750	0%	0	100%	226.091.250		
		1	02	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN						107.662.500			100%		100%	107.662.500		
		1	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100%	100%	41.648.000	100%	230.035.000	100%	232.335.350	100%	234.658.704	100%	237.005.291	100%	975.682.344		
		1	02	06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat		0	3 dokumen	177.650.000	3 dokumen	184.602.850	3 dokumen	186.448.879	3 dokumen	188.313.367	3 dokumen	737.015.096		
							Jumlah kegiatan Rapat Lintas Program & Rapat Konsultasi Dinas-PKM			2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
							Jumlah kegiatan penyusunan SPM bidang Kesehatan			1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali			
		1	02	06	05	Penyusunan Profil Kesehatan	Jumlah buku Profil Kesehatan yang disusun	100%	14 Buku	41.648.000	14 Buku	52.385.000	14 Buku	47.732.500	14 Buku	48.209.825	14 Buku	48.691.923	14 Buku	238.667.248	
							Jumlah Puskesmas yang mengikuti pertemuan pemutakhiran data Profil Kesehatan		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		
		1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	80%	85,00%	7.553.829.963	90%	9.754.368.422	95%	9.829.805.264	100%	11.949.994.334	100%	10.464.091.816	100%	49.552.089.799		
		1	02	15	01	Pengadaan obat & perbekalan kesehatan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem E Logistik		12 Bulan	7.553.829.963	12 Bulan	9.754.368.422	12 Bulan	9.829.805.264	12 Bulan	11.949.994.334	12 Bulan	10.464.091.816	12 Bulan	49.552.089.799	
							Jumlah Repacking Obat dan Perbekalan Kesehatan		12 Puskesmas		12 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		
							Jumlah Belanja Bahan Obat Obatan		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
		1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	61,84	61,84	15.157.585.538	63	31.000.646.600	64	31.000.711.260	100	42.705.746.823	100	41.511.952.308	100	161.376.642.528		
							Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		1	02	16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)		8.100.000	37682 jiwa	41.186.000	37682 jiwa	41.186.103	37682 jiwa	56.754.450	37682 jiwa	61.862.350	37682 jiwa	209.088.903		
							Jumlah Biaya transportasi Pengobatan Lanjut Masyarakat Miskin (Non PNS)		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		
							Jumlah Pertemuan Evaluasi Program JKNIKIS Tingkat Kota Palu		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
							Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kesehatan tradisional Alternatif dan Komplementer		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	02		KESEHATAN			43.659.115.851		62.740.114.022		67.334.113.236		85.014.919.297		81.055.527.836		339.696.127.742	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Pertemuan Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD) JKN Tkt. Kota Palu				1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
					Jumlah Pertemuan Tim Penilai Asuhan Mandiri Tkt. Kota Palu				1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
					Jumlah Kegiatan Survey Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)				48 Hatra		48 Hatra		48 Hatra		48 Hatra		48 Hatra		48 Hatra	
		1	02	16	02	Pemeliharaan & pemulihan kesehatan	100%	12 Puskesmas	3.370.125.538	12 Puskesmas	8.259.228.600	13 Puskesmas	8.259.249.248	14 Puskesmas	11.381.245.464	14 Puskesmas	10.984.801.500	14 Puskesmas	42.254.650.350	
					Jumlah Kegiatan BOK Puskesmas				225 Kali		225 Kali		225 Kali		225 Kali		225 Kali		225 Kali	
					Jumlah Kegiatan Tim P3K Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan				2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali	
					Jumlah Kegiatan Pertemuan Pembahasan Data SP2TP				1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali	
					Jumlah Pertemuan Orientasi Pembina UKS				1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali	
					Jumlah Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)				1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali	
					Jumlah Jasa medis Jaga Malam Puskesmas Rawat Inap				3 Puskesmas		3 Puskesmas		3 Puskesmas		3 Puskesmas		3 Puskesmas		3 Puskesmas	
					Jumlah Jasa medis Puskesmas Sore				12 Puskesmas		12 Puskesmas		13 Puskesmas		14 Puskesmas		14 Puskesmas		14 Puskesmas	
		1	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	100%	12 Bulan	11.779.360.000	12 Bulan	22.515.762.000	12 Bulan	22.515.805.447	12 Bulan	31.013.546.614	12 Bulan	30.208.874.517	12 Bulan	118.033.348.577	
					Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan				12 Puskesmas		12 Puskesmas		13 Puskesmas		14 Puskesmas		14 Puskesmas		14 Puskesmas	
					Belanja Kapitasi Puskesmas				0		12 Bulan	184.470.000	12 Bulan	184.470.461	12 Bulan	254.200.295	12 Bulan	256.413.941	12 Bulan	879.554.698
		1	02	16	17	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus & RS			0		12 Bulan	184.470.000	12 Bulan	184.470.461	12 Bulan	254.200.295	12 Bulan	256.413.941	12 Bulan	879.554.698
					Jumlah Belanja Pusa Operator Nomoni Emergency Services Team (NEST)						80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang	
					Jumlah Kegiatan Pertemuan Validasi Data SIRS, Klinik Praktek Swasta dan Puskesmas						47 Praktek		47 Praktek		47 Praktek		47 Praktek		47 Praktek	
					Jumlah Jasa Tenaga Kerja Asisten Dokter Pengelola Laporan Rujukan Klinik dan Dokter						14 RS		14 RS		14 RS		14 RS		14 RS	
					Jumlah Jasa Tenaga Kerja Pengelola Data Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)						12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
					Jumlah Jasa Tenaga Kerja Petugas Operator Nomoni Emergency Service						14 RS		14 RS		14 RS		14 RS		14 RS	
					Jumlah Jasa Operasional Nomoni Emergency Services Team (Mobile)						14 RS		14 RS		14 RS		14 RS		14 RS	
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Rumah Sakit Tingkat Kota Palu						0		0		0		0		0	
		1	02	16	18	Peningkatan pelayanan kesehatan siswa			0		0		0		0		0		0	
		1	02	17		Program Pengawasan Obat & Makanan	80%	85%	69.494.512	90%	118.836.500	95%	130.720.150	97%	137.256.157	100%	141.118.865	100%	597.426.184	
					Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina				60 Sarana		60 Sarana		60 Sarana		60 Sarana		60 Sarana		60 Sarana	
		1	02	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya			69.494.512		118.836.500		130.720.150		137.256.157		141.118.865		597.426.184	
					Jumlah sarana IRTP yang dipantau/diperiksa				2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali	
					Pertemuan Penyuluhan keamanan pangan P-IRT															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		1	02		KESEHATAN			43.659.115.851		62.740.114.022		67.334.113.236		85.014.919.297		81.055.527.836		339.696.127.742	DINAS KESEHATAN		
		1	02	19	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Prersentase Rumah Tangga Ber-PHBS	100%	100%	1.280.647.925	100%	873.944.800	100%	961.339.280	100%	1.209.364.814	100%	1.209.406.244	100%	5.534.703.063		
						Cakupan Desa Siaga Aktif	89,13	91,30		97,83		100%		100%		100%		100%			
		1	02	19	01	Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kampanye integrasi Germas - Galigasa Tk. Puskesmas	100%	13 PKM	321.555.000	13 PKM	67.602.000	13 PKM	142.215.280	13 PKM	178.906.822	13 PKM	178.948.252	13 PKM	889.227.354	
							Jumlah pengadaan sarana pendukung penyuluhan (Leaflet, Baliho, stiker, x-banner, flip chart, umbul-)		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promosi kesehatan		13 PKM		13 PKM		13 PKM		13 PKM		13 PKM		13 PKM		
							Jumlah Kartu berobat kaderyang dicetak														
		1	02	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terlaksananya penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat		0			0		0		0		0		0	
		1	02	19	03	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Jumlah Posyandu yang mendapatkan Insentif bagi Kader/Toma	100%	218 Posyand	959.092.925	223 Posyand	806.342.800	224 Posyand	819.124.000	225 Posyand	1.030.457.992	226 Posyand	1.030.457.992	226 Posyand	4.645.475.709	
							Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan kesehatan masyarakat Tk. Kota &		46 Kelurahan		46 Kelurahan		46 Kelurahan		46 Kelurahan		46 Kelurahan		46 Kelurahan		
							Jumlah peserta Workshop penyusunan Balok SKDN untuk Kader Posyandu		61 Kader		61 Kader		61 Kader		61 Kader		61 Kader		61 Kader		
							Jumlah Kegiatan Pengembangan Posyandu dan SKDN		218 Posyand		223 Posyand		224 Posyand		225 Posyand		226 Posyand		226 Posyand		
		1	02	19	06	Sosialisasi desa siaga	Terlaksananya Desa siaga		0			0		0		0		0		0	
		1	02	19	07	Pemetaan PHBS	Terpelakannya PHBS di wilayah Puskesmas		0			0		0		0		0		0	
		1	02	19	10	Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH)	Terlaksananya kegiatan Pramuka Saka Bakti Husada		0			0		0		0		0		0	
		1	02	19	13	Pembinaan Posyandu	Terlaksananya kegiatan Posyandu		0			0		0		0		0		0	
		1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	1.461.068.390	100%	699.372.000	100%	769.309.200	100%	807.774.660	100%	848.163.393	100%	4.585.687.643	
							Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
							Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita	2,3	2,2		2,1		2,0		1,9		1,8		1,8		
		1	02	20	03	Penanggulangan KEP. Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit A dan	Jumlah penanganan Kasus Bayi & Balita Gizi buruk di Puskesmas		55 Kasus	1.461.068.390	55 Kasus	699.372.000	55 Kasus	769.309.200	55 Kasus	807.774.660	55 Kasus	848.163.393	55 Kasus	4.585.687.643	
							Jumlah penanganan Kasus Bayi & Balita Gizi kurang		550 Kasus		550 Kasus		550 Kasus		550 Kasus		550 Kasus		550 Kasus		
							Jumlah penanganan Kasus Anemia Bumi KEK		500 Kasus		500 Kasus		500 Kasus		500 Kasus		500 Kasus		500 Kasus		
							Jumlah Posyandu yang mendapat kegiatan PMT pemulihan		218 Posyand		223 Posyand		224 Posyand		225 Posyand		226 Posyand		226 Posyand		
							Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat orientasi pemantauan pertumbuhan dan tata laksana gizi buruk		1500 Kasus		1500 Kasus		1500 Kasus		1500 Kasus		1500 Kasus		1500 Kasus		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 02	KESEHATAN				43.659.115.851		62.740.114.022		67.334.113.236		85.014.919.297		81.055.527.836		339.696.127.742	DINAS KESEHATAN
		1 02 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Penduduk yang memiliki Akses Air Minum berkualitas, Jamban yang memenuhi syarat kesehatan	100%	0%	0	100%	64.279.000	100%	70.706.900	100%	104.242.245	100%	77.954.357	100%	317.182.502	
		1 02 21 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Tersosialisasinya kebijakan lingkungan sehat	0%	0%	0	0%	0		0						0	
		1 02 21 04	Monitoring, evaluasi & pelaporan	Jumlah Honor Tim Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Kota Palu	0	0	0	12 Bulan	64.279.000	12 Bulan	70.706.900	12 Bulan	104.242.245	12 Bulan	77.954.357	12 Bulan	317.182.502	
				Jumlah Honor Tim Penyusun Dokumen Pengembangan Kota Sehat Tk. Kota Palu				12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
				Biaya pemeriksaan sampel Air Parameter Merkuri 30				50 Sampel		50 Sampel		100 Sampel		100 Sampel		100 Sampel		
				Jumlah Stiker pengawasan DAMIU yang di Cetak				5000 Lembar		5000 Lembar		5000 Lembar		5000 Lembar		5000 Lembar		
				Jumlah Kegiatan Verifikasi Data Lapangan STBM				12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
				Jumlah Pertemuan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Tingkat Kota Palu				1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
				Jumlah Pertemuan Penyuluhan Hygiene Sanitasi Kantin Sekolah Tingkat Kota Palu				1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
				Jumlah peserta Kegiatan Tes Kebugaran Jemaah Haji				750 Orang		750 Orang		750 Orang		750 Orang		750 Orang		
		1 02 21 09	Penyehatan air	Terlaksananya pemeriksaan sampel air dan makanan	0%	0%	0	0%	0		0							
		1 02 22	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular				941.096.477		706.335.250		776.968.775		815.817.214		856.608.074		4.096.825.790	
				Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	0	100%		
				Cakupan penemuan & penanganan Penderita DBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Keluarahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	86%	88%		90%		92%		95%		100%		100%		
		1 02 22 05	Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala dan Abatesasi		46 Keluraha	723.888.500	46 Keluraha	434.805.250	46 Keluraha	493.631.275	46 Keluraha	518.312.839	46 Keluraha	544.228.481	46 Keluraha	2.714.866.344	
				Jumlah Kegiatan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV AIDS		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		
				Jumlah Kegiatan Survey Pengendalian Vektor Malaria Pemeriksaan Jentik Anopheles		50 Rumah		50 Rumah		50 Rumah		50 Rumah		50 Rumah		50 Rumah		
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi "Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik"		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
				Jumlah Pemeriksaan POD Penderita Kusta dalam rangka Pencegahan Cacat Akibat Kusta		15 Kasus		15 Kasus		15 Kasus		15 Kasus		15 Kasus		15 Kasus		
				Jumlah Penanganan Kasus Reaksi Kusta		20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		
				Jumlah Penemuan Kasus Kusta		35 Kasus		35 Kasus		35 Kasus		35 Kasus		35 Kasus		35 Kasus		
				Jumlah Pengambilan & Pewarnaan Sediaan Darah Malaria		800 Slide		800 Slide		800 Slide		800 Slide		800 Slide		800 Slide		
				Jumlah Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria		800 Slide		800 Slide		800 Slide		800 Slide		800 Slide		800 Slide		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 02	KESEHATAN				43.659.115.851		62.740.114.022		67.334.113.236		85.014.919.297		81.055.527.836		339.696.127.742	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Pemeriksaan IVA dan CBE dalam rangka Hari Kanker dan Gerakan Pencegahan		1700 Orang		1700 Orang		1700 Orang		1700 Orang		1700 Orang		1700 Orang		
				Jumlah Screening Pemeriksaan Diabetes Melitus, Hipertensi, Gangguan Jiwa, Katarak, dan Gangguan Pendengaran		1500 Orang		1500 Orang		1500 Orang		1500 Orang		1500 Orang		1500 Orang		
				Kegiatan Sosialisasi Typoid pada anak Sekolah Dasar		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		
				Kegiatan Sosialisasi HIV pada Anak Sekolah Menengah Pertama		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		
		1 02 22 08	Peningkatan Imunisasi	Jumlah siswa Kelas 1 SD mendapat Imunisasi Campak di sekolah		7000 Siswa	35.582.400	7000 Siswa	68.200.000	7000 Siswa	99.410.000	7000 Siswa	104.380.500	7000 Siswa	109.599.525	7000 Siswa	417.172.425	
				Jumlah siswa Kelas 1 SD mendapat Imunisasi DT di sekolah		7000 Sisw		7000 Sisw		7000 Sisw		7000 Sisw		7000 Sisw		7000 Sisw		
				Jumlah siswa Kelas 2/3 SD mendapat Imunisasi TT di sekolah		14000 Sisw		14000 Sisw		14000 Sisw		14000 Sisw		14000 Sisw		14000 Sisw		
				Jumlah Kegiatan Penyuluhan TD WUS Tingkat SMA Wilayah Kota Palu		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		1 02 22 09	Peningkatan Surveilans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	Jumlah Kegiatan Validasi Data Lintas Program Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan		1 Kali	82.070.000	1 Kali	69.347.500	1 Kali	61.367.500	1 Kali	64.435.875	1 Kali	67.657.669	1 Kali	344.878.544	
				Jumlah Kegiatan Kajian Data Program Surveilans Bagi Puskesmas Se Kota Palu		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
				Jumlah Pengambilan Sampel Darah Campak		100 Sampel		100 Sampel		100 Sampel		100 Sampel		100 Sampel		100 Sampel		
				Jumlah Pelacakan Kasus Berpotensi KLB		8 RS		8 RS		8 RS		8 RS		8 RS		8 RS		
		1 02 22 12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Mata	Jumlah Jasa pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji			99.555.577		133.982.500		122.560.000		128.688.000		135.122.400		619.908.477	
				Jumlah Jasa pemeriksaan Kesehatan Petugas Reaksi Cepat Krisis Kesehatan Tingkat Kota Palu														
				Jumlah Jasa pemeriksaan kesehatan Pemantauan Pemberangkatan (Embarkasi) CJH dan Pemulangan														
				Jumlah Jasa Penyuntikan Calon Jamaah haji Tingkat Kota Palu														
				Jumlah Jasa Pelacakan Jamaah haji Tingkat Kota Palu														
		1 02 23	Program Standarisasi Pelayanan kesehatan	Persentase kepuasan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	76%	80%	1.105.552.237	83%	286.773.300	85%	315.450.630	90%	646.995.693	95%	381.695.262	95%	2.736.467.122	
		1 02 23 06	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Tim Penyusun Dokumen Akreditasi	100%	10 Orang	493.571.686	10 Orang	205.581.800	10 Orang	232.403.630	10 Orang	559.796.343	10 Orang	381.695.262	10 Orang	1.873.048.721	
				Jumlah Pengolahan dan Analisa Data Survei Pelanggan Puskesmas		12 Puskesmas		12 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		
				Jumlah Jasa Tim Survey Kepuasan Pelanggan (Pasien)		12 Puskesmas		12 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		
		1 02 23 09	Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Evaluasi Gugus Kendali Mutu	100%	100%	611.980.551	0		0		0		0		100%	611.980.551	
		1 02 23 10	Monitoring, evaluasi & pelaporan	Terlaksananya visitasi kelayakan perizinan tenaga dan sarana kesehatan		0		0		0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 02	KESEHATAN				43.659.115.851		62.740.114.022		67.334.113.236		85.014.919.297		81.055.527.836		339.696.127.742	DINAS KESEHATAN
		1 02 23 19	Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan	Jasa konsultasi perencanaan Ranperda Kesehatan Reproduksi			0	1 Paket	81.191.500	1 Paket	83.047.000	1 Paket	87.199.350		0	1 Paket	251.437.850	
		1 02 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah Penyebaran informasi produk Hukum daerah Perda No.2 Tahun 2016 tentang DBD				1 Paket		1 Paket		1 Paket				1 Paket		
		1 02 24 01	Pelayanan Operasi Katarak	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan sunatan massal gratis	100	1000 anak	103.000.000	1440 anak	144.000.000	1000 anak	158.400.000	1000 anak	166.320.000	1000 anak	174.636.000	5440 anak	746.356.000	
		1 02 24 04	Pelayanan Sunatan Massal	Terlaksananya pelayanan operasi katarak													0	
		1 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Terlaksananya pelayanan sunatan massal	100%	100%	103.000.000	100%	144.000.000	100%	158.400.000	100%	166.320.000	100%	174.636.000	100%	746.356.000	
		1 02 25 01	Pembangunan Puskesmas	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	3,4	3,4	8.909.261.781	3,6	8.792.815.650	3,6	10.111.737.998	3,8	11.628.498.697	3,8	13.372.773.502	3,8	52.815.087.627	
		1 02 25 01	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Biaya Tender Pembangunan Puskesmas			0		419.875.000		482.856.250		555.284.688		638.577.391		2.096.593.328	
		1 02 25 01	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Perjalanan Dinas Kerfokasi Untuk Perencanaan, Pengendali dan Pengawasan														
		1 02 25 01	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan														
		1 02 25 07	Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	Jumlah Belanja Alat ukur	1 Paket	1 Paket	8.445.311.781	1 Paket	3.337.853.259	1 Paket	3.838.531.248	1 Paket	4.414.310.935	1 Paket	5.076.457.575	1 Paket	25.112.464.798	
		1 02 25 07	Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	Jumlah Belanja Barang Perlengkapan / Peralatan Kantor (Meja Kursi untuk Posyandu)														
		1 02 25 07	Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan														
		1 02 25 14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas	Jumlah Pemeliharaan bangunan Puskesmas			202.000.000		3.013.679.891		3.465.731.875		3.985.591.656		4.583.430.404		15.250.433.826	
		1 02 25 15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah pemeliharaan bangunan Puskesmas pembantu & Poskesdes			0		38.987.500		44.835.625		51.560.969		59.295.114		194.679.208	
		1 02 25 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Keliling	Jumlah pemeliharaan kendaraan Pusling roda 4			34.000.000		88.000.000		101.200.000		116.380.000		133.837.000		473.417.000	
		1 02 25 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab			0		1.894.420.000	11 unir	2.178.583.000	11 unir	860.238.665	11 unir	989.274.465	11 unir	5.922.516.130	
		1 02 25 23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya rakontek DAK, survey harga, dan evaluasi ASPAK			227.950.000		0		0		0		0		227.950.000	
		1 02 25 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab			0		0		0		750.000.000		862.500.000		1.612.500.000	
		1 02 25 26	Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis	Pembangunan Rumah medis/paramedis			0		0		0		0		0		0	
		1 02 25 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Medis dan Paramedis	Jumlah Rumah medis yang direhab			0		0		0		895.131.785		1.029.401.553		1.924.533.338	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 02	KESEHATAN				43.659.115.851		62.740.114.022		67.334.113.236		85.014.919.297		81.055.527.836		339.696.127.742	DINAS KESEHATAN
		1 02 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	AKB per 1.000 Kelahiran Hidup	6,18	5,29	68.748.380	4,43	0	3,66	75.623.218	3,17	83.185.540	2,47	87.344.817	2,47	314.901.955	
				Cakupan kunjungan bayi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		1 02 29 04	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	Jumlah Jasa Pengiriman sampel SHK (Screening Hipolyroid Kongenital)			68.748.380	150 Sampel	0	175 Sampel	75.623.218	209 Sampel	83.185.540	200 Sampel	87.344.817	200 Sampel	314.901.955	
				Biaya Jasa Pemeriksaan Laboratorium Sampel SHK				150 Sampel		175 Sampel		209 Sampel		200 Sampel		200 Sampel		
				Biaya jasa pengambilan sampel SHK				150 Sampel		175 Sampel		209 Sampel		200 Sampel		200 Sampel		
		1 02 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	288.204.300	100%	258.875.000	100%	797.706.250	100%	1.212.591.562	100%	328.221.141	100%	2.885.598.253	
		1 02 30 01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Jasa kader yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pelayanan di Posbindu Lansia		98 Posbindu	288.204.300	98 Posbindu	258.875.000	110 Posbindu	797.706.250	112 Posbindu	1.212.591.562	115 Posbindu	328.221.141	115 Posbindu	2.885.598.253	
				Jumlah Cetak buku kesehatan pribadi lansia		500 Buku		500 Buku		1000 Buku		1200 Buku		1500 Buku		1500 Buku		
		1 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	AKI (Angka Kematian Ibu) per 100.000 Kelahiran Hidup	258,66	243	1.509.268.568	228,57	2.321.441.399	211,27	4.432.361.450	206,90	5.598.979.522	191,78	3.573.928.499	191,78	17.435.979.438	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96%	96,50%		97,00%		97,50%		98,00%		98,5%		98,5%		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		1 02 32 04	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	Jumlah Pelatihan deteksi dini kasus resiko tinggi dan kegawatdaruratan maternal neonatal			1.509.268.568	4 Hari	2.321.441.399	4 Hari	4.432.361.450	4 Hari	5.598.979.522	4 Hari	3.573.928.499	4 Hari	17.435.979.438	
				Jumlah Spanduk Rumah Tunggu Kelahiran				3 RTK		3 RTK		3 RTK		2 RTK		2 RTK		
				Biaya Transportasi rujukan ke RTK dan RS				55 Kali		70 Kali		85 Kali		65 Kali		65 Kali		
				Biaya Visum KDRT/ Pemeriksaan				200 sampel		200 sampel		200 sampel		200 sampel		200 sampel		
				Jumlah Pertemuan Audit Maternal Perinatal				2 Hari		2 Hari		2 Hari		2 Hari		2 Hari		
				Jumlah Pertemuan dengan tim Pengkaji AMP				2 tw		2 tw		2 tw		2 tw		2 tw		
				Jumlah Konsumsi pendamping ibu hamil di Rumah Tunggu Kelahiran				250 Orang		400 Orang		540 Orang		350 Orang		350 Orang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																			
		01																	
		01	02																
		01	02	02															
		01	02	02	2.01														
		01	02	02	2.01	01													
		01	02	02	2.01	02													
		01	02	02	2.01	03													
		01	02	02	2.01	04													
		01	02	02	2.01	05													
		01	02	02	2.01	06													
		01	02	02	2.01	07													
		01	02	02	2.01	08													
		01	02	02	2.01	09													
		01	02	02	2.01	10													
		01	02	02	2.01	11													
		01	02	02	2.01	12													
		01	02	02	2.01	13													
		01	02	02	2.01	14													
		01	02	02	2.01	15													
		01	02	02	2.01	16													
		01	02	02	2.01	17													
		01	02	02	2.01	18													
		01	02	02	2.01	19													
		01	02	02	2.01	20													

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota												49.887.738.956			
		01	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu hamil Menurunnya AKI di kota Palu, menuju AKI nol											100%	3.573.928.499		
		01	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu bersalin dan melahirkan di Faskes Menurunnya AKI di kota Palu, menuju AKI nol											100%	268.046.374		
		01	02	02	2.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi Menurunnya AKB di kota Palu, menuju 15/1000 kelahiran hidup											100%	8.734.482		
		01	02	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan pada balita											100%	48.039.649		
		01	02	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh pada usia sekolah pendidikan dasar yang dijangar di sekolah Menurunnya angka morbiditas anak sekolah											100%	30.570.686		
		01	02	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia sekolah pendidikan dasar yang dijangar di sekolah											100%	219.137.450		
		01	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan lansia yang diskriming Menurunnya angka morbiditas lansia											100%	318.221.141		
		01	02	02	2.02	08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi											100%	10.300.000		
		01	02	02	2.02	09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi											100%	82.600.000		
		01	02	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita ODGJ Berat											100%	63.600.000		
		01	02	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Presentasi prevalensi orang dengan terduga tuberkulosis											100%	100.517.400		
		01	02	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Terdeteksinya Orang yang beresiko HIV											100%	103.000.000		
		01	02	02	2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Terlindunginya masyarakat dari KLB											100%	35.000.000		
		01	02	02	2.02	14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan											100%	60.000.000		
		01	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penanganan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan ibu hamil KEK											100%	848.163.393		
		01	02	02	2.02	16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Terwujudnya Tes Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji Kota Palu, ASN dan Anak Sekolah											100%	65.515.000		
		01	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penguatan Penggerakkan Aktifitas Fisik											950 orang			
		01	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, dan Penanganan Sampah Rumah Tangga											100%	24.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		01	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Persentase Informasi kesehatan yang dapat tersebar luas di semua kalangan masyarakat											100%	105.000.000				
		01	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya survei Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional											100%	45.072.500				
		01	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pemantauan kondisi dan determinan kesehatan masyarakat											100%	50.000.000				
		01	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)											100%	16.800.000				
		01	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza.											100%	20.400.000				
		01	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Menurunnya Cakupan Penderita Kesehatan Khusus											100%	35.000.000				
		01	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																	
		01	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya sasaran deteksi dini SADANIS dan tes IVA											100%	373.351.250				
								Menurunnya Angka Kesakitan DBD										100%						
								Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Malaria										100%						
		01	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya											100%	32.936.342.582				
		01	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Pemeriksaan Tes Urine (Napza)											100%	86.000.000				
		01	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit											100%	20.000.000				
		01	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan Pertemuan Penguatan Forum Kota /Kab. Sehat (KKS)											100%	30.000.000				
		01	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
		01	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan																	
		01	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
		01	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tercapainya Pelayanan Puskesmas											100%	8.656.415.550				
								Klinik Pelayanan Sore										100%						
								Pelayanan P3K										100%						
								Sosialisasi Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat										100%						
								UKM Primer (Pis PK, UKM esensial dan Pengembangan Fungsi Manajemen Puskesmas)										100%						
		01	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentasi Layanan Kesehatan Rujukan yang Sesuai Standar											100%	78.543.000				
		01	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Terlaksananya akreditasi Puskesmas											100%	1.530.000.000				
		01	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase penanganan kejadian yang tidak diharapkan											100%	20.000.000				
		01	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase penanggulangan wabah											100%	25.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi												917.460.000			
		01 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kesehatan sebagai pendukung Sistem Informasi bidang kesehatan											100%	88.660.000		
		01 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan jaringan sistem informasi kesehatan											15 Unit	115.560.000		
		01 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya perangkat sistem informasi yang mendukung terintegrasinya SIK di Kota Palu											100%	713.250.000		
		01 02 02 2.04	Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota													249.275.000		
		01 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D	Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring											100%	21.600.000		
		01 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatkan Pengetahuan SDM tentang Sistem Rujukan Terintegrasi											100%	15.375.000		
		01 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan											100%	185.000.000		
		01 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas											100%	27.300.000		
		01 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													848.700.000		
		01 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota													48.500.000		
		01 02 03 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota	Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tindak lanjut perizinan											100%	48.500.000		
		01 02 03 2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota													289.800.000		
		01 02 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan di faskes yang ada											100%	75.800.000		
		01 02 03 2.02 02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan											100%	125.000.000		
		01 02 03 2.02 03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan											100%	89.000.000		
		01 02 03 2.03	Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP,UKM manusia di Wilayah Kab/Kota													104.600.000		
		01 02 03 2.03 01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pemenuhan distribusi dan pemerataan SDM Kesehatan											100%	45.600.000		
		01 02 03 2.03 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan											100%	59.000.000		
		01 02 03 2.04	Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota													160.800.000		
		01 02 03 2.04 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan											100%	115.800.000		
		01 02 03 2.04 02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kesehatan											100%	45.000.000		
		01 02 03 2.05	Pembinaan & Pengawasan SDM Kesehatan untuk UKM, UKP Tingkat Daerah Kab/Kota													245.000.000		
		01 02 03 2.05 01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan SDM Kesehatan											100%	120.000.000		
		01 02 03 2.05 02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi SDM Kesehatan											100%	125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		01	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN											164.500.000				
		01	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, T.Obat, T.Alkes dan Optikal, Usaha mikro obat tradisional (UMOT)											67.000.000				
		01	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan									100%	27.000.000			
		01	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tertindaknya sasaran program peningkatan efektifitas pengawasan sarana apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)									100%	30.000.000			
		01	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	inventarisasi jumlah izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diperiksa									100%	10.000.000			
		01	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alkes Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga											0			
		01	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alkes Kelas 1 tertentu dan														
		01	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga														
		01	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk Produksi Makanan											35.000.000			
		01	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk Produksi Makanan	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan									100%	35.000.000			
		01	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM											45.000.000			
		01	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah	Tertindaknya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sehingga Terbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)									15 TPM dan 50 DAM	45.000.000			
		01	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Jajanan											17.500.000			
		01	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Tertindaknya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan									55 Lokasi TPM	17.500.000			
		01	02	04	2.06		Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT											0			
		01	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
		01	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan IRT														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	02	05													520.000.000			
		01	02	05	2.01												100%	75.000.000		
		01	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kebijakan, dunia usaha/Swasta/LSM yang memanfaatkan Sumber dayanya untuk mendukung kesehatan										75.000.000		
		01	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perilaku Hidup Bersih dan Sehat									100%	170.000.000		
		01	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	Pelaksanaan kegiatan Hidup Bersih dan Sehat										170.000.000		
		01	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota	Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan									100%	275.000.000		
		01	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan										275.000.000		
		01																		
		01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											25.058.616.565		
		01	2.01				PERENCANAAN & EVALUASI KIERJA PERANGKAT DAERAH											422.175.000		
			01	2.01	01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja Dinas Kesehatan tepat waktu dan lengkap									100%	26.350.000		
			01	2.01	02		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan yang lengkap									100%	126.700.000		
			01	2.01	03		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya pelaporan evaluasi dan realisasi program tepat waktu									100%	12.015.000		
			01	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah													
			01	2.01	05		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi Kinerja Program SPM bid Kesehatan dan pertemuan Dinas-Puskesmas									100%	257.110.000		
			01	2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN											5.926.355.077		
			01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan Tunjangan									100%	5.447.505.077		
			01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya tata Kelola Keuangan yang transparan dan Akuntabel									100%	273.000.000		
			01	2.02	03		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Terlaksananya verifikasi SPJ									100%	12.000.000		
			01	2.02	04		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Dokumentasi laporan Keuangan									100%	143.000.000		
			01	2.02	05		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumentasi bahan tanggapan pemeriksaan									100%	2.500.000		
			01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Telaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja Dinas Kesehatan									100%	14.350.000		
			01	2.02	07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	terlaksananya hasil laporan keuangan bulanan/ semester									100%	12.000.000		
			01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran									100%	6.000.000		
			01	2.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun									100%	16.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01.2.03	ADMINISTRASI UMUM												17.087.067.072			
		01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat di Dinas Kesehatan											100%	55.000.000		
		01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan											100%	813.280.680		
		01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor											100%	124.000.000		
		01.2.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS															
		01.2.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah															
		01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpenuhinya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional											100%	1.139.950.000		
		01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terwujudnya administrasi keuangan dan laporan keuangan											100%	292.530.000		
		01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor											100%	319.822.081		
		01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja											100%	85.833.000		
		01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor											100%	585.000.000		
		01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan											100%	230.707.000		
		01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor											100%	20.736.212		
		01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor											100%	49.465.818		
		01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan rumah tangga											100%	330.000.000		
		01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan											100%	10.299.960		
		01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor														
		01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman											100%	26.842.320		
		01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi berdasarkan surat tugas dan surat perintah											100%	76.300.000		
		01.2.03.19	Pengadaan Mobil Jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan											100%	360.000.000		
		01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional											100%	1.750.000.000		
		01.2.03.21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan jabatan/dinas														
		01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor											100%	125.000.000		
		01.2.03.23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan rumah jabatan/dinas														
		01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan gedung kantor											100%	4.450.000.000		
		01.2.03.25	Pengadaan Meubeler	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan meubeler											100%	3.500.000.000		
		01.2.03.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan rumah jabatan											100%	254.000.000		
		01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan rumah dinas											100%	415.000.000		
		01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan gedung kantor											100%	135.000.000		
		01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpenuhinya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan											100%	24.000.000		
		01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional											100%	296.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		01 2.03 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terperuhnya kebutuhan jasa peralatan dan jabatan/dinas															
		01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terperuhnya kebutuhan jasa peralatan dan gedung kantor											100%	165.500.000			
		01 2.03 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Mobil Jabatan	Terperuhnya mobil jabatan secara berkala											100%	56.000.000			
		01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terperuhnya kebutuhan jasa peralatan dan jabatan/dinas															
		01 2.03 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Meubeler sesuai kebutuhan											100%	75.800.000			
		01 2.03 36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan																
		01 2.03 37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehab sedang/berat rumah dinas sesuai kebutuhan											100%	415.000.000			
		01 2.03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat rumah gedung kantor (Puskesmas) sesuai kebutuhan											100%	619.000.000			
		01 2.03 39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Terlaksananya rehab sedang/berat mobil jabatan sesuai kebutuhan											100%	112.000.000			
		01 2.03 40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan operasional sesuai kebutuhan											100%	175.000.000			
		01 2.04	PENINGKATAN DISIPLIN & KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													1.623.019.416			
		01 2.04 01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Absensi (FingerPrint/Paket)											100%	23.000.000			
		01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kota & Puskesmas											100%	607.500.000			
		01 2.04 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																
		01 2.04 04	Pengadaan Pakaian Korpri	Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kota & Puskesmas											100%	420.000.000			
		01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kota & Puskesmas											100%	390.000.000			
		01 2.04 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																
		01 2.04 07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas																
		01 2.04 08	Pemindahan Tugas PNS																
		01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terperuhnya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kompetensi profesi yang dimiliki											100%	56.516.801			
		01 2.04 10	Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Perda di bidang kesehatan											100%	35.000.000			
		01 2.04 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang-undangan	Terperuhnya kebutuhan jasa peralatan dan perUndang-undangan											100%	91.002.615			

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu periode Tahun 2016–2021 menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode Tahun 2016–2021. Dengan demikian indikator capaian pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD menjadi dasar bagi setiap PD dalam mencapai indikator sasaran program/kegiatan.

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ditetapkan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2016)	% Capaian		% Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,93	70,31	70,44	70,56	70,69	70,69
2.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,70	0,66	0,62	0,58	0,54	0,50	0,50
3.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0,9958	0,9964	0,9973	0,9977	0,9982	0,9986	0,9986
4.	Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	4,89	1,70	2,67	2,52	2,43	2,23	2,23
5.	Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	2,30	1,13	2,67	2,43	2,20	2,01	2,01
6.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	158	156	56	50	37	28	28
7.	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	3,48	3,42	3,37	3,6	3,8	3,8	3,8
8.	Rasio dokter persatuan penduduk per 10.000 penduduk	58,28	80,04	98,54	98,75	98,93	99,01	99,01
9.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	99,88%	100	100	100	100	100	100%
10.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,16%	97,50	96,67	97,02	97,31	97,50	97,50%
11.	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	95,65%	91,31	93,48	94,32	95,52	96,33	96,33%
12.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100	100	100	100	100	100%
13.	AFP (per 100.000 penduduk < 15 tahun)	4,99	6,01	2,28	2,11	1,9	1,75	1,75

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2016)	% Capaian		% Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
14.	Cakupan balita Penumonia yang ditangani	126,67%	115,95	95,09	96,20	97,10	98,44	98,44%
15.	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100	98,63	98,80	99,82	99,91	99,91%
16.	Cakupan Cakupan penemuan dan penanganan Penyakit DBD	100%	100	100	100	100	100	100%
17.	Penderita Diare yang ditangani	96,88%	86,17	100	100	100	100	100%
18.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	6,93%	8,66	24,05	24,01	24,19	25	25 %
19.	Cakupan kunjungan bayi	100%	100	100	100	100	100	100%
20.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,56%	97,61	96,58	100	100	100	100%
21.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96,16%	97,50	96,67	100	100	100	100%
22.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88,39%	86,28	86,97	86	90	100	100%
23.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	83,39	100	100	100	100	100
24.	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,22%	87,54	79,64	100	100	100	100%
25.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	-	-	-	90	95	100	100 %
26.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,24%	100	99,66	100	100	100	100 %

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2016)	% Capaian		% Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
27.	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	17,99	15,63	100	100	100	100 %
28.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,38%	92,92	85,35	100	100	100	100 %
29.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	95,67	66,26	64	65	100	100%
30.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100	100	100	100	100	100%
31.	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	33%	37,23	41,67	100	100	100	100%
32.	Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30%	31,37	39,83	100	100	100	100%
33.	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	100%	100	100	100	100	100	100%
34.	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	65%	71,25	50,05	100	100	100	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi, serta indikator kinerja program/kegiatan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Palu selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Renstra yang telah disusun ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dalam bidang kesehatan.

Seiring berjalannya waktu dengan segala perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi sosial, politik, iklim baik bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan, maka Renstra yang telah disusun ini dapat disesuaikan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh aparat dan instansi terkait, termasuk para tenaga kesehatan, dengan mengikut sertakan secara langsung peran aktif pihak swasta dan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Palu ini dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kesehatan di Kota Palu.

**HALAMAN
LAMPIRAN**

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
A.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)																		
	1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	95 %			91	92	93	94	95	93,81	96,43	98,80	95,75	96,71	103,09	104,82	106,24	101,86	101,81
	2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80 %			100	100	100	100	100	100,00	56,65	88,09	44,35	124,32	100,00	56,65	88,09	44,35	124,32
	3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90 %			90	90,5	91	92	93	93,68	96,10	96,75	95,82	95,60	104,09	106,19	106,31	104,15	102,80
	4. Cakupan pelayanan nifas	90 %								93,71	88,08	92,74	93,51	91,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 %			87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	100,00	25,58	64,84	65,49	75,02	114,55	29,31	74,27	75,02	85,94
	6. Cakupan kunjungan bayi	90 %			100	100	100	100	100	33,82	76,73	97,39	94,42	97,77	33,82	76,73	97,39	94,42	97,77
	7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %			100	100	100	100	100	97,67	100,00	100,00	100,00	97,78	97,67	100,00	100,00	100,00	97,78
	8. Cakupan pelayanan anak balita	90 %			90	95	100	100	100	10,62	52,76	86,13	85,80	84,45	11,80	55,54	86,13	85,80	84,45
	9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bln Keluarga Miskin	100 %			0	0	0	0	0	38,98	14,75	21,11	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %			55	65	75	95	100	86,52	92,63	97,19	98,01	98,38	157,31	142,51	129,59	103,17	98,38
	12. Cakupan peserta KB aktif	100 %			46	50	55	60	70	54,97	56,48	72,07	65,02	53,46	119,51	112,96	131,04	108,36	76,37
	13. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit :																		
	a. AFP (/100.000 pddk<15th)	2 /100.000 pddk			7	7	7	7	7	8,22	12,37	12,07	12,23	8,65	117,44	176,71	172,40	174,70	123,52
	b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100 %			100	100	100	100	100	36,24	74,71	112,55	105,09	187,25	36,24	74,71	112,55	105,09	187,25
	c. Penemuan Pasien baru TB BTA +	100 %								47,95	48,82	49,38	53,21	58,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	d. Penderita DBD yang ditangani	100 %			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	e. Penemuan penderita Diare	100 %								44,02	46,16	85,59	92,06	89,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %			88	90	95	98	100	111,21	101,08	121,09	140,90	98,00	126,38	112,31	127,47	143,77	98,00
	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %								30,24	5,26	6,32	16,60	7,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100 %			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penvelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	80 %			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) (Permendagri No 73 Tahun 2009)																		
	1. Angka kelangsungan hidup bayi		0,66 %							0,9939	0,9931	0,9905	0,9938	0,9967	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2. Angka usia harapan hidup		75,33 tahun							70,26	70,54	70,72	70,72	70,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	3. Persentase balita gizi buruk		0,46 %		1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,19	0,16	0,21	0,12	0,15	19,00	20,00	30,00	20,00	30,00
	4. Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000 balita)		11		7	8	9	10	11	8,8818	5,7322	7,3603	4,6772	6,4280	126,88	71,65	81,78	46,77	58,44
	5. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk																		
	1. Puskesmas (/1.000 pddk)		0,0383							0,0344	0,0329	0,0311	0,0311	0,0361	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2. Poliklinik (/1.000 pddk)		0,0224							0,0293	0,0220	0,0207	0,0441	0,0473	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	3. Pustu (/1.000 pddk)		0,0926							0,0831	0,0797	0,7519	0,7525	0,8343	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000 pddk)		0,4790		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4013	0,3847	0,3629	0,3373	0,3615	401,30	384,70	362,90	337,30	361,50
	7. Rasio dokter per satuan penduduk (/100.000 pddk)		0,2235		0,25	0,3	0,35	0,40	0,45	0,4414	0,4232	0,4096	0,3658	0,3476	176,56	141,07	117,03	91,45	77,24
	8. Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih		100 %		100	100	100	100	100	89,35	87,80	88,46	85,80	85,76	89,35	87,80	88,46	85,80	85,76
C.	INDIKATOR KESEHATAN LAINNYA																		
	1. Posyandu Purnama Mandiri			40 %	36	37	38	39	40	55,30	59,36	63,18	60,36	63,51	153,61	160,43	166,26	154,77	158,78
	2. Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usila			60 %	42	45	50	55	60	35,85	40,53	27,23	91,69	86,06	85,36	90,07	54,46	166,71	143,43
	3. Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)			100 %	100	100	100	100	100	99,60	98,70	99,20	99,50	98,10	99,60	98,70	99,20	99,50	98,10
	4. Bayi Berat Badan Lahir Rendah ditangani			100 %	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5. Penderita kusta yang selesai berobat (RFT Rate) :			100 %	91	92	93	94	95	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,91	108,70	107,53	106,38	105,26
	6. Penderita Infeksi Menular Seksual yang diobati			100 %	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7. Angka Bebas Jentik (ABJ)			100 %	80	85	90	95	100	82,95	84,96	88,01	88,60	87,91	103,69	99,95	97,79	93,26	87,91
	8. Tempat pengelolaan makanan dan minuman (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan			90 %	70	75	80	85	90	86,06	91,29	86,89	85,56	92,76	122,94	121,72	108,61	100,66	103,07
	9. Balita yang naik berat badannya (N/D)			100 %	80	85	90	95	100	97,08	63,91	80,42	83,47	82,96	121,35	75,19	89,36	87,86	82,96
	10. Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)			75 %	55	60	65	70	75	56,62	63,87	64,30	67,16	73,90	102,95	106,45	98,92	95,94	98,53
	11. Bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif			80 %	60	65	70	75	80	59,45	55,75	52,03	59,70	67,60	99,08	85,77	74,33	79,60	84,50
	12. Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe			96 %	92	93	94	95	96	93,78	94,56	98,80	94,34	95,65	101,93	101,68	105,11	99,31	99,64
	13. Balita mendapat kapsul vitamin A 2x pertahun			100 %	89,5	90	93	95	100	87,15	97,71	82,01	84,18	85,83	97,37	108,57	88,18	88,61	85,83
	14. Rata-rata persentase anggaran kesehatan dari APBD Kota Palu			15 %	5	8	10	13	15	5,14	13,55	11,56	18,36	17,00	102,80	169,38	115,60	141,23	113,33
	15. persentase kota yang membuat profil kesehatan			100 %	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	02		KESEHATAN	14.986.078.595	11.708.516.469	18.133.043.773	43.317.119.010	44.309.006.240	14.805.050.320	11.208.485.212	17.412.327.831	39.539.094.325	40.123.631.523	98,79	95,73	96,03	91,28	90,55	43,54	39,90	
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	713.814.925	825.438.892	1.345.240.699	1.997.830.381	2.351.662.328	700.813.671	823.091.949	1.336.576.862	1.981.065.191	2.317.537.202	98,18	99,72	99,36	99,16	98,55	36,21	36,26	
1	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air & listrik	57.560.000	61.127.656	115.449.996	103.405.620	184.205.940	44.651.098	58.947.500	107.119.609	89.598.030	77,57	96,43	92,78	86,65	93,99	40,69	47,66	
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	199.452.700	193.527.000	287.250.000	419.875.000	1.187.478.000	199.402.973	193.516.000	287.074.000	419.875.000	99,98	99,99	99,94	100,00	99,84	68,61	68,51	
1	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.900.000	15.300.000	19.200.000	30.000.000	1.200.000	14.900.000	15.300.000	19.200.000	29.790.000	100,00	100,00	100,00	99,30	100,00	-2,89	-3,16	
1	02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.100.000	5.980.000	3.850.000	18.000.000	27.000.000	8.100.000	5.925.200	3.850.000	17.990.400	100,00	99,08	100,00	99,95	100,00	88,94	88,87	
1	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	35.073.825	77.266.753	32.904.649	103.516.825	86.779.368	35.073.825	77.266.753	32.904.649	103.516.825	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	65,33	65,33	
1	02	01	11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan					19.724.000				19.724.000					100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	02	01	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	8.998.400	34.427.483	94.121.054	78.264.936	11.309.020	8.955.775	34.426.496	93.963.604	75.536.936	99,53	100,00	99,83	96,51	99,97	88,40	88,18	
1	02	01	17	Penyediaan makanan & minuman	50.330.000	54.360.000	53.145.000	63.768.000	85.262.000	50.330.000	54.360.000	53.145.000	63.758.000	100,00	100,00	100,00	99,98	99,99	14,87	14,86	
1	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	339.400.000	383.450.000	739.320.000	1.181.000.000	748.704.000	339.400.000	383.350.000	739.320.000	1.181.000.000	100,00	99,97	100,00	100,00	97,17	32,23	31,79	
1	02	01	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	0	0	0	6.236.331.000	0	0	0	0	4.702.022.192	0				75,40	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	02	01	02	Pembangunan gedung kantor				5.891.531.000					4.357.222.192				73,96	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	02	01	03	Pengadaan mobil jabatan				344.800.000					344.800.000				100,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	14.964.150	18.870.544	215.449.336	254.142.504	173.471.200	14.963.750	18.870.544	215.449.332	251.182.504	172.264.200	100,00	100,00	100,00	98,84	99,30	263,51	263,25	
1	02	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4.719.400	4.719.400	18.050.000	18.550.000	85.573.400	4.719.000	4.719.400	18.050.000	18.550.000	99,99	100,00	100,00	100,00	99,53	161,64	161,10	
1	02	05	04	Penyusunan PAK tenaga fungsional	10.244.750	14.151.144	197.399.336	235.592.504	87.897.800	10.244.750	14.151.144	197.399.332	232.632.504	100,00	100,00	100,00	98,74	99,08	322,43	322,09	
1	02	15	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	3.098.091.387	2.554.575.832	3.156.874.393	4.154.942.915	2.869.823.469	3.098.091.387	2.553.313.128	2.914.830.026	4.121.805.532	2.867.071.757	100,00	99,95	92,33	99,20	99,90	1,68	1,89	
1	02	15	01	Pengadaan obat & perbekalan kesehatan	3.098.091.387	2.554.575.832	3.156.874.393	4.154.942.915	2.869.823.469	3.098.091.387	2.553.313.128	2.914.830.026	4.121.805.532	100,00	99,95	92,33	99,20	99,90	1,68	1,89	
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.226.555.070	3.405.850.181	3.384.665.827	13.183.987.386	17.386.570.307	1.177.983.572	2.939.863.956	2.968.200.747	11.129.453.741	14.612.357.076	96,04	86,32	87,70	84,42	84,04	124,61	114,20	
1	02	16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya	141.940.000	2.256.562.400	2.263.527.225	11.806.903.600	1.613.066.440	141.927.500	1.803.909.650	1.866.738.125	9.756.426.122	99,99	79,94	82,47	82,63	98,88	456,35	378,37	
1	02	16	02	Pemeliharaan & pemulihan kesehatan	24.629.150	28.690.000	43.985.600	49.005.000	135.494.900	24.629.125	28.690.000	43.985.600	48.900.500	134.744.900	100,00	100,00	100,00	99,79	99,45	64,43	64,13
1	02	16	17	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus & RS	7.085.800	19.379.000	27.891.000	21.254.636	72.724.850	7.062.915	19.379.000	27.889.575	21.244.635	64.804.850	99,68	100,00	99,99	99,95	89,11	108,95	99,88
1	02	16	18	Peningkatan pelayanan kesehatan siswa	93.504.750	91.256.500	91.256.400	89.815.500	49.537.660	93.504.750	89.661.500	91.249.300	89.803.800	47.362.660	100,00	98,25	99,99	99,99	95,61	-12,21	-12,80
1	02	16	20	Dukungan operasional Puskesmas	914.883.170	1.001.426.281	958.005.602	1.217.008.650	1.367.010.776	866.347.082	989.687.806	938.338.147	1.213.078.684	1.341.147.643	94,69	98,83	97,95	99,68	98,11	11,12	12,22
1	02	17	Program Pengawasan Obat & Makanan	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,92	50,92	
1	02	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	21.469.050	19.474.700	18.964.500	43.169.600	81.132.800	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,92	50,92
1	02	19	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	375.052.150	393.058.895	883.614.270	1.091.826.850	1.186.490.470	370.680.650	388.498.849	883.337.250	1.084.599.400	1.176.805.470	98,83	98,84	99,97	99,34	99,18	40,46	40,87	
1	02	19	01	Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat	6.510.000	14.520.000	127.199.950	415.552.750	488.159.870	6.510.000	14.520.000	126.945.100	409.657.050	481.634.870	100,00	100,00	99,80	98,58	98,66	285,81	284,40
1	02	19	06	Sosialisasi desa siaga	165.528.250	166.211.250	152.585.050	199.206.600	162.675.500	162.773.250	161.731.250	152.568.550	198.114.050	161.015.500	98,34	97,30	99,99	99,45	98,98	1,11	1,21
1	02	19	07	Pemetaan PHBS	95.954.200	106.757.145	326.957.620	176.642.000	224.805.000	94.346.700	106.702.099	326.951.950	176.407.000	224.805.000	98,32	99,95	100,00	99,87	100,00	49,70	50,23
1	02	19	10	Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH)	2.899.700	2.370.500	2.555.600	5.110.500	19.710.100	2.890.700	2.345.500	2.555.600	5.106.300	18.510.100	99,69	98,95	100,00	99,92	93,91	93,80	88,10
1	02	19	13	Pembinaan Posyandu	104.160.000	103.200.000	274.316.050	295.315.000	291.140.000	104.160.000	103.200.000	274.316.050	295.315.000	290.840.000	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	42,78	42,76
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	257.073.973	256.507.600	929.663.200	959.247.200	1.180.737.200	256.992.108	256.507.600	929.661.000	959.235.680	1.180.677.200	99,97	100,00	100,00	100,00	99,99	72,12	72,13	
1	02	20	03	Penanggulangan KEP. Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit.A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya	257.073.973	256.507.600	929.663.200	959.247.200	1.180.737.200	256.992.108	256.507.600	929.661.000	959.235.680	1.180.677.200	99,97	100,00	100,00	100,00	99,99	72,12	72,13
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	43.706.100	68.158.600	205.079.055	218.444.800	122.960.200	43.706.100	68.158.550	202.591.555	218.443.600	122.960.200	100,00	100,00	98,79	100,00	100,00	54,91	54,32	
1	02	21	03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	16.117.000	14.363.000	125.126.385	138.485.200	88.254.000	16.117.000	14.363.000	122.686.385	138.485.200	88.254.000	100,00	100,00	98,05	100,00	100,00	183,67	179,98
1	02	21	04	Monitoring, evaluasi & pelaporan	6.405.000	10.525.600	11.045.570	22.500.000	18.040.000	6.405.000	10.525.550	11.045.570	22.500.000	18.040.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	38,29	38,29

URAIAN					ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	02	21	09	Penyehatan air	21.184.100	43.270.000	68.907.100	57.459.600	16.666.200	21.184.100	43.270.000	68.859.600	57.458.400	16.666.200	100,00	100,00	99,93	100,00	100,00	18,97	18,96
1	02	22		Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	421.203.200	521.623.000	865.184.320	1.278.330.000	1.359.865.913	418.871.700	514.403.059	861.754.635	1.255.645.066	1.354.803.913	99,45	98,62	99,60	98,23	99,63	35,96	35,98
1	02	22	05	Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	255.202.250	340.099.000	680.545.600	1.097.679.600	1.155.641.488	255.202.250	337.321.950	679.557.500	1.075.050.816	1.154.090.488	100,00	99,18	99,85	97,94	99,87	49,99	49,80
1	02	22	08	Peningkatan Imunisasi	56.152.000	55.520.000	54.585.236	53.326.800	42.955.800	56.113.000	55.520.000	54.473.736	53.312.450	39.444.800	99,93	100,00	99,80	99,97	91,83	-6,14	-7,77
1	02	22	09	Peningkatan Surveillans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	46.818.200	58.510.000	65.492.400	63.865.000	70.283.000	46.718.200	58.417.109	65.342.065	63.833.000	70.283.000	99,79	99,84	99,77	99,95	100,00	11,12	11,17
1	02	22	12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra	63.030.750	67.494.000	64.561.084	63.458.600	90.985.625	60.838.250	63.144.000	62.381.334	63.448.800	90.985.625	96,52	93,55	96,62	99,98	100,00	11,10	11,92
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	140.195.400	295.203.200	424.976.510	500.269.614	484.396.200	140.195.150	295.203.200	424.327.000	493.738.914	453.707.143	100,00	100,00	99,85	98,69	93,66	42,27	40,64
1	02	23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	71.284.850	76.436.400	168.944.950	133.176.214	263.097.200	71.284.620	76.436.400	168.884.950	127.098.114	250.664.443	100,00	100,00	99,96	95,44	95,27	51,16	50,16
1	02	23	02	Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan	59.581.800	211.236.600	222.455.100	341.221.500	201.354.500	59.581.800	211.236.600	221.878.350	340.887.500	183.798.200	100,00	100,00	99,74	99,90	91,28	68,06	66,78
1	02	23	06	Monitoring, evaluasi & pelaporan	9.328.750	7.530.200	33.576.460	25.871.900	19.944.500	9.328.730	7.530.200	33.563.700	25.753.300	19.244.500	100,00	100,00	99,96	99,54	96,49	70,19	69,47
1	02	24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	242.500.000	223.750.000	350.000.000	350.000.000	370.000.000	242.500.000	223.750.000	350.000.000	350.000.000	370.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	13,60	13,60
1	02	24	01	Pelayanan Operasi Katarak	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00
1	02	24	03	Pelayanan Operasi Bibir Sumbing	37.500.000	18.750.000				37.500.000	18.750.000				100,00	100,00				#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	24	04	Pelayanan Sunatan Massal	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	120.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	120.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11,25	11,25
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya	8.140.093.890	2.828.919.600	5.922.174.163	12.008.234.310	15.711.830.776	8.027.614.807	2.810.400.752	5.875.586.424	11.915.388.655	14.442.026.844	98,62	99,35	99,21	99,23	91,92	44,43	42,02
1	02	25	01	Pembangunan Puskesmas	506.000.000		608.000.000	2.362.100.000	3.529.268.541	462.543.000		605.385.725	2.324.216.000	3.513.444.907			99,57	98,40	99,55	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	02	Pembangunan Puskesmas Pembantu		1.352.750.000					1.342.493.000			#DIV/0!	99,24				#DIV/0!	#DIV/0!	
1	02	25	07	Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	6.307.340.000	879.383.000	2.692.325.303	4.664.281.403	9.140.398.935	6.255.800.217	873.440.000	2.669.036.100	4.633.175.450	7.904.547.427	99,18	99,32	99,13	99,33	86,48	72,33	65,93
1	02	25	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas	50.000.000	50.000.000		69.493.047	136.000.000	50.000.000	49.982.152		69.493.047	135.918.500	100,00	99,96		100,00	99,94	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Pembantu				56.250.000	75.000.000				56.250.000	75.000.000				100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Keliling			50.000.000	75.000.000	62.085.200			50.000.000	74.999.549	62.084.910			100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	370.000.000	187.407.000	2.263.050.000	2.576.550.000		364.393.000	185.970.000	2.252.643.589	2.558.471.000		98,48	99,23	99,54	99,30		243,02	243,98
1	02	25	23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	304.753.890	359.379.600	308.798.860	419.748.860	87.623.100	295.806.590	358.515.600	298.521.010	419.514.710	87.623.100	97,06	99,76	96,67	99,94	100,00	-9,84	-8,53
1	02	25	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	602.000.000			741.720.000	2.395.205.000	599.072.000			739.679.000	2.377.396.000				99,72	99,26	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	25	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Medis dan Paramedis				1.043.091.000	286.250.000				1.039.589.899	286.012.000				99,66	99,92	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	29		Program Pelatihan & Pendidikan Perawatan Anak Balita	18.196.200	18.196.200	49.136.150	49.136.150	46.136.150	18.118.800	18.122.250	49.136.150	48.786.150	46.136.150	99,57	99,59	100,00	99,29	100,00	40,98	41,25
1	02	29	04	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	18.196.200	18.196.200	49.136.150	49.136.150	46.136.150	18.118.800	18.122.250	49.136.150	48.786.150	46.136.150	99,57	99,59	100,00	99,29	100,00	40,98	41,25
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	23.746.000	23.746.000	121.829.200	118.904.150	110.404.150	23.692.475	23.688.650	121.829.200	118.804.150	110.404.150	99,77	99,76	100,00	99,92	100,00	100,88	101,18
1	02	30	01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	23.746.000	23.746.000	121.829.200	118.904.150	110.404.150	23.692.475	23.688.650	121.829.200	118.804.150	110.404.150	99,77	99,76	100,00	99,92	100,00	100,88	101,18
1	02	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	88.065.800	87.590.800	58.057.650	63.057.650	359.544.577	88.005.800	87.590.800	58.045.650	63.037.650	359.113.918	99,93	100,00	99,98	99,97	99,88	111,13	111,02
1	02	32	04	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	88.065.800	87.590.800	58.057.650	63.057.650	359.544.577	88.005.800	87.590.800	58.045.650	63.037.650	359.113.918	99,93	100,00	99,98	99,97	99,88	111,13	111,02
1	02	34		Program Kebijakan & Manajemen Pengembangan Kesehatan	161.351.300	167.552.425	202.134.500	809.264.500	513.980.500	161.351.300	167.547.225	202.037.500	802.716.300	456.633.500	100,00	100,00	99,95	99,19	88,84	72,09	69,66
1	02	34	01	Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan	66.920.050	74.635.600	94.016.200	485.785.700	390.212.000	66.920.050	74.630.400	94.016.200	479.265.200	332.865.000	100,00	99,99	100,00	98,66	85,30	108,63	104,18
1	02	34	02	Penyusunan Profil Kesehatan	47.502.150	37.321.050	49.196.000	228.110.900	50.319.500	47.502.150	37.321.050	49.140.600	228.089.150	50.319.500	100,00	100,00	99,89	99,99	100,00	74,03	74,11
1	02	34	03	Penyusunan Perencanaan Dinkes Kota Palu	46.929.100	55.595.775	58.922.300	95.367.900	73.449.000	46.929.100	55.595.775	58.880.700	95.361.950	73.449.000	100,00	100,00	99,93	99,99	100,00	15,83	15,84

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KOTA PALU

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan dan pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	69,93	70,31	70,44	70,56	70,69

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KOTA PALU

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA - IKU DINAS KESEHATAN
Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	9
1.	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1 Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	Baik (80)	Baik (82)	Baik (84)	Baik (86)	Sangat Baik (89)
			2 Prevalensi balita gizi buruk	0,66	0,62	0,58	0,54	0,50
			3 Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100%	100%	100%	100%
			4 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30%	97,83%	100%	100%	100%

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU
(PENAMBAHAN MISI IV)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	9
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	CC	CC	B	BB	A

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

VISI WALI KOTA : "PALU KOTA JASA BERBUDAYA DAN VERADAT DILANDASI IMAN DAN TAQWA"			
MISI 2 : Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Potensi Sumberdaya Manusia			
SUB MISI 2 : Pelayanan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas	1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau melalui jaminan kesehatan daerah 3. Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian 4. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat 5. Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB)
		2. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan	6. Peningkatan promosi kesehatan / Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 7. Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju univesal coverage
MISI 4 : Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Melakukan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					baru lahir	Menurunnya AKB di kota Palu, menuju 15/1000 kelahiran hidup														
		01	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan pada balita									100%	48.039.649		
		01	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh pada usia sekolah pendidikan dasar yang di jaring di sekolah Menurunnya angka morbiditas anak sekolah									100%	30.570.686		
		01	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia sekolah pendidikan dasar yang di jaring di sekolah									100%	219.137.450		
		01	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan lansia yang diskriming Menurunnya angka morbiditas lansia									100%	318.221.141		
		01	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi									100%	10.300.000		
		01	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi									100%	82.600.000		
		01	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita ODGJ Berat									100%	63.600.000		
		01	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Presentasi prevalensi orang dengan terduga tuberkulosis									100%	100.517.400		
		01	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Terdeteksinya Orang yang beresiko HIV									100%	103.000.000		
		01	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Terlindunginya masyarakat dari KLB									100%	35.000.000		
		01	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan									100%	60.000.000		
		01	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penanganan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan ibu hamil KEK									100%	848.163.393		
		01	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Terwujudnya Tes Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji Kota Palu, ASN dan Anak Sekolah Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penguatan Penggerakkan Aktifitas Fisik								950 orang	100%	65.515.000		
		01	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, dan Penanganan Sampah Rumah Tangga									100%	24.440.000		
		01	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Persentase Informasi kesehatan yang dapat tersebar luas di semua kalangan masyarakat									100%	105.000.000		
		01	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya survei Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional									100%	45.072.500		
		01	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pemantauan kondisi dan determinan kesehatan masyarakat									100%	50.000.000		
		01	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)									100%	16.800.000		
		01	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza.									100%	20.400.000		
		01	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Menurunnya Cakupan Penderita Kesehatan Khusus									100%	35.000.000		
		01	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan													
		01	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya sasaran deteksi dini SADANIS dan tes IVA Menurunnya Angka Kesakitan DBD Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Malaria									100%	373.351.250		
		01	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya									100%	32.936.342.582		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Pemeriksaan Tes Urine (Napza)								100%	86.000.000			
		01	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit								100%	20.000.000			
		01	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan Pertemuan Penguatan Forum Kota /Kab. Sehat (KKS)								100%	30.000.000			
		01	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
		01	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan													
		01	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
		01	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tercapainya Pelayanan Puskesmas								100%	8.656.415.550			
							Klinik Pelayanan Sore								100%					
							Pelayanan P3K								100%					
							Sosialisasi Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat								100%					
							UKM Primer (Pis PK, UKM esensial dan Pengembangan Fungsi Manajemen Puskesmas)								100%					
		01	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentasi Layanan Kesehatan Rujukan yang Sesuai Standar								100%	78.543.000			
		01	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Terlaksananya akreditasi Puskesmas								100%	1.530.000.000			
		01	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase penanganan kejadian yang tidak diharapkan								100%	20.000.000			
		01	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase penanggulangan wabah								100%	25.000.000			
		01	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										917.460.000			
		01	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kesehatan sebagai pendukung Sistem Informasi bidang kesehatan								100%	88.660.000			
		01	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan jaringan sistem informasi kesehatan							15 Unit	115.550.000				
		01	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya perangkat sistem informasi yang mendukung terintegrasinya SIK di Kota Palu							100%	713.250.000				
		01	02	02	2.04		Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota										249.275.000			
		01	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D	Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring							100%	21.600.000				
		01	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatkan Pengetahuan SDM tentang Sistem Rujukan Terintegrasi							100%	15.375.000				
		01	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan							100%	185.000.000				
		01	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas							100%	27.300.000				
		01	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										848.700.000			
		01	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota										48.500.000			
		01	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota	Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tindak lanjut perizinan							100%	48.500.000				
		01	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota										289.800.000			
		01	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan di faskes yang ada							100%	75.800.000				
		01	02	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan							100%	125.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM								100%	89.000.000			
		01	02	03	2.03		Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota										104.600.000			
		01	02	03	2.03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pemenuhan distribusi dan pemerataan SDM								100%	45.600.000			
		01	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan SDM								100%	59.000.000			
		01	02	03	2.04		Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota										160.800.000			
		01	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM								100%	115.800.000			
		01	02	03	2.04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kesehatan								100%	45.000.000			
		01	02	03	2.05		Pembinaan & Pengawasan SDM Kesehatan untuk UKM, UKP Tingkat Daerah Kab/Kota										245.000.000			
		01	02	03	2.05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan								100%	120.000.000			
		01	02	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi SDM								100%	125.000.000			
		01	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN										164.500.000			
		01	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, T.Obat, T.Alkes dan Optikal, Usaha mikro obat tradisional (UMOT)										67.000.000			
		01	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan								100%	27.000.000			
		01	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya sasaran program peningkatan efektifitas pengawasan sarana apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)								100%	30.000.000			
		01	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	inventarisasi jumlah izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diperiksa								100%	10.000.000			
		01	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alkes Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga										0			
		01	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alkes Kelas 1 tertentu dan													
		01	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1													
		01	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk Produksi Makanan										35.000.000			
		01	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk Produksi Makanan	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan								100%	35.000.000			
		01	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM										45.000.000			
		01	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum	Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sehingga Terbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)								15 TPM dan 50 DAM	45.000.000			
		01	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Jajanan										17.500.000			
		01	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan								55 Lokasi TPM	17.500.000			
		01	02	04	2.06		Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT										0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD											
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.									
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
		01	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																				
		01	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan IRT																				
		01	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															520.000.000					
		01	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan															100%	75.000.000			
		01	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kebijakan, dunia usaha/Swasta/LSM yang memanfaatkan Sumber dayanya untuk mendukung kesehatan																75.000.000			
		01	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perilaku Hidup Bersih dan Sehat																100%	170.000.000		
		01	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pelaksanaan kegiatan Hidup Bersih dan Sehat																	170.000.000		
		01	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota	Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan																100%	275.000.000		
		01	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan																	275.000.000		
		01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																		25.058.616.565		
		01	2.01				PERENCANAAN & EVALUASI KIERJA PERANGKAT DAERAH																		422.175.000		
		01	2.01	01			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daaerh	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja Dinas Kesehatan tepat waktu dan lengkap																	100%	26.350.000	
		01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan yang lengkap																		100%	126.700.000
		01	2.01	03			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya pelaporan evaluasi dan realisasi program tepat waktu																		100%	12.015.000
		01	2.01	04			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah																				
		01	2.01	05			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi Kinerja Program SPM bid Kesehatan dan pertemuan Dinas-Puskesmas																		100%	257.110.000
		01	2.02				ADMINISTRASI KEUANGAN																			5.926.355.077	
		01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan Tunjangan																		100%	5.447.505.077
		01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya tata Kelola Keuangan yang transparan dan Akuntabel																		100%	273.000.000
		01	2.02	03			Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Terlaksananya verifikasi SPJ																		100%	12.000.000
		01	2.02	04			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Dokumentasi laporan Keuangan																		100%	143.000.000
		01	2.02	05			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumentasi bahan tanggapan pemeriksaan																		100%	2.500.000
		01	2.02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Telaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja Dinas Kesehatan																		100%	14.350.000
		01	2.02	07			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	terlaksananya hasil laporan keuanganbulanan/ semester																		100%	12.000.000
		01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran																		100%	6.000.000
		01	2.02	09			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun																		100%	16.000.000
		01	2.03				ADMINISTRASI UMUM																			17.087.067.072	
		01	2.03	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat di Dinas Kesehatan																		100%	55.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan										100%	813.280.680			
		01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor										100%	124.000.000			
		01.2.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS															
		01.2.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah															
		01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpenuhinya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional										100%	1.139.950.000			
		01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terwujudnya administrasi keuangan dan laporan keuangan										100%	292.530.000			
		01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor										100%	319.822.081			
		01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja										100%	85.833.000			
		01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor										100%	585.000.000			
		01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan										100%	230.707.000			
		01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor										100%	20.736.212			
		01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor										100%	49.465.818			
		01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan rumah tangga										100%	330.000.000			
		01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturanPerundang-undangan										100%	10.299.960			
		01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor														
		01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman										100%	26.842.320			
		01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi berdasarkan surat tugas dan surat perintah										100%	76.300.000			
		01.2.03.19	Pengadaan Mobil Jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan										100%	360.000.000			
		01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional										100%	1.750.000.000			
		01.2.03.21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan jabatan/dinas														
		01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor										100%	125.000.000			
		01.2.03.23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan rumah jabatan/dinas														
		01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan gedung kantor										100%	4.450.000.000			
		01.2.03.25	Pengadaan Meubeler	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan meubeler										100%	3.500.000.000			
		01.2.03.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan rumah jabatan										100%	254.000.000			
		01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan rumah dinas										100%	415.000.000			
		01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan gedung kantor										100%	135.000.000			
		01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpenuhinya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan										100%	24.000.000			
		01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional										100%	296.000.000			
		01.2.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan jabatan/dinas														
		01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan gedung kantor										100%	165.500.000			
		01.2.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan secara berkala										100%	56.000.000			
		01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan jabatan/dinas														
		01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Meubeler sesuai kebutuhan										100%	75.800.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan															
		01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehab sedang/berat rumah dinas sesuai kebutuhan										100%	415.000.000			
		01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat rumah gedung kantor (Puskesmas) sesuai kebutuhan										100%	619.000.000			
		01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Terlaksananya rehab sedang/berat mobil jabatan sesuai kebutuhan										100%	112.000.000			
		01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan operasional sesuai kebutuhan										100%	175.000.000			
		01	2.04		PENINGKATAN DISIPLIN & KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR												1.623.019.416			
		01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Absensi (FingerPrint/Paket)										100%	23.000.000			
		01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kota & Puskesmas										100%	607.500.000			
		01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan															
		01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kota & Puskesmas										100%	420.000.000			
		01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kota & Puskesmas										100%	390.000.000			
		01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun															
		01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas															
		01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS															
		01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kompetensi profesi yang dimiliki										100%	56.516.801			
		01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Perda di bidang kesehatan										100%	35.000.000			
		01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perUndang-undangan										100%	91.002.615			

Tabel T-C.28
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2016)	% Capaian		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,93	70,31	70,44	70,56	70,69	70,69
2	Prevalensi balita gizi buruk	0,70 %	0,66 %	0,62 %	0,58 %	0,54 %	0,50 %	0,50 %
3	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0,9958	0,9964	0,9973	0,9977	0,9982	0,9986	0,9986
4	Angka kematian Balita per 1.000 Kelahiran hidup	4,89	1,7	2,67	2,52	2,43	2,23	2,23
5	Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran hidup	2,3	1,13	2,67	2,43	2,20	2,01	2,01
6	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	158	156	56	50	37	28	28
7	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	3,48	3,42	3,37	3,60	3,80	3,80	3,80
8	Rasio Dokter per satuan Penduduk	58,28	80,04	98,54	98,75	98,93	99,01	99,01
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	99,88 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	96,16 %	97,50 %	96,67 %	97,02 %	97,31 %	97,50 %	97,50 %
11	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95,65 %	91,31 %	93,48 %	94,32 %	95,52 %	96,33 %	96,33 %
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	AFP Rate per 100.000 penduduk	4,99	6,01	2,28	2,11	1,90	1,75	1,75
14	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	126,67 %	116,95 %	95,09 %	96,20 %	97,10 %	98,44 %	9,44 %
15	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %	100 %	98,63 %	98,8 %	99,82 %	99,91 %	99,91 %
16	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Penderita Diare yang ditangani	98,88 %	86,17 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	6,93 %	8,66 %	24,05 %	24,01 %	24,19 %	25 %	25 %
19	Cakupan kunjungan bayi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
20	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	97,56 %	97,61 %	96,58 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96,16 %	97,50 %	96,67 %	100 %	100 %	100 %	100 %
22	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88,39 %	86,28 %	86,97 %	86 %	90 %	95 %	95 %
23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	83,39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
24	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,22 %	87,54 %	79,64 %	100 %	100 %	100 %	100 %
25	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	-	-	-	90 %	95 %	100 %	100 %
26	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,24 %	100 %	99,66 %	100 %	65 %	66 %	66 %
27	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	17,79 %	15,63 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2016)	% Capaian		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,38 %	92,92 %	85,35 %	100 %	100 %	100 %	100 %
26	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %	95,67 %	66,26 %	64 %	65 %	100 %	100 %
30	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
31	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	33 %	37,23 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
32	Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 %	31 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
33	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
34	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	65 %	71,25 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %